

**PERAN LSM “KELUARGA BESAR BURUH MIGRAN INDONESIA
(KABAR BUMI)” DALAM MELAKUKAN ADVOKASI
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI
ARAB SAUDI TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

GANITRI DANURDHARA NANDAKLANA

20323215

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PERAN LSM “Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)”
DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

GANITRI DANURDHARA NANDAKLANA

20323215

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN LSM “KELUARGA BESAR BURUH MIGRAN INDONESIA
(KABAR BUMI)” DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2020-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

17/10/2024

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan

[Signature]
[Signature]
[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

28 Oktober 2024



Ganitri Danurdhara Nandaklana

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 TANTANGAN DAN ANCAMAN DALAM KEHIDUPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI.....	17
2.1 Identifikasi tantangan dan hambatan yang dialami pekerja migran 2020-2022 di Arab Saudi	18
2.2 Kebijakan Pemerintah Terhadap PMI di Masa Covid	29
2.3 Peran dan Profil Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)	32
BAB 3 ADVOKASI KELUARGA BESAR PEKERJA MIGRAN INDONESIA (KABAR BUMI) DI ARAB SAUDI.....	39
3.1 Pendekatan The Advocacy Strategy Framework dalam Perlindungan PMI oleh KABAR BUMI di Arab Saudi (2020-2022)	39
3.1.1 Audiens (<i>Audiences</i>)	40
1. Masyarakat Umum.....	41
2. Pemberi Pengaruh Kebijakan	41

3. Pengambil Keputusan	42
3.1.2 Perubahan (<i>Change</i>)	43
1. Kesadaran (<i>awaranness</i>)	43
2. Keinginan (<i>will</i>).....	45
3. Tindakan (<i>action</i>)	49
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Grafik 1 Data Penempatan PMI Tahun 2017-2019	1
Grafik 2 Grafik 2 Data Penempatan PMI Tahun 2020-2022	2
Grafik 3 Data Penempatan PMI di Arab Saudi	19
Grafik 4 Pengaduan PMI di Arab Saudi Total Pengaduan 1.123	21
Grafik 5 Jenis Kasus Yang Dialami PMI Tahun 2022	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 The Advocacy Strategy Framework	11
Gambar 2 10 Negara Penempatan Dengan Pengaduan Tertinggi	22
Gambar 3 Akun Resmi Instagram Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)	44
Gambar 4 Modul Panduan Penanganan & Pendampingan Kasus Pekerja Migran Indonesia	47
Gambar 5 Akun Resmi Instagram KABAR BUMI	51

DAFTAR SINGKATAN

KABAR BUMI	: Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia
LPK	: Lembaga Pelatihan Kerja
P3MI	: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
SDM	: Sumber daya Manusia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
PMIB	: Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah
PLBI	: Pos Lintas Batas internasional
SPLP	: Surat Perjalanan Laksana Paspor
PRT	: Pekerja Rumah Tangga

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk melihat bagaimana peran Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam memberikan advokasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi tahun 2020-2022. Peran KABAR BUMI sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, melalui pertanyaan yang tertera dalam penelitian, peneliti akan mempertanyakan mengenai bagaimana strategi advokasi KABAR BUMI dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di Arab Saudi pada periode 2020-2022. Dalam proses menjawab, model kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model teori *The Advocacy Strategy Framework* karya Julia Coffman dan Tanya Beer. Untuk melihat keberhasilan strategi advokasi Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), terdapat dua aspek utama yaitu audiensi (audiences) dan perubahan (change). Strategi ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik dan efektif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kata-kata kunci: *Perlindungan, Advokasi, PMI, KABAR BUMI, Strategi*

ABSTRACT

This research was motivated to see the role of the Extended Family of Indonesian Migrant Workers (KABAR BUMI) in providing advocacy protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) in Saudi Arabia in 2020-2022. KABAR BUMI's role is very important in efforts to provide protection and fulfill the rights of Indonesian Migrant Workers (PMI). Therefore, through the questions stated in the research, researchers will ask about KABAR BUMI's advocacy strategy in providing protection for PMI in Saudi Arabia in the 2020-2022 period. In the process of answering, the thinking framework model used in this research is the theoretical model of The Advocacy Strategy Framework by Julia Coffman and Tanya Beer. To see the success of the advocacy strategy for the Large Family of Indonesian Migrant Workers (KABAR BUMI), there are two main aspects, namely audiences and change. This strategy aims to create better and more effective protection for Indonesian Migrant Workers (PMI).

Keywords: *IProtection, Advocacy, PMI, KABAR BUMI, Strategy*

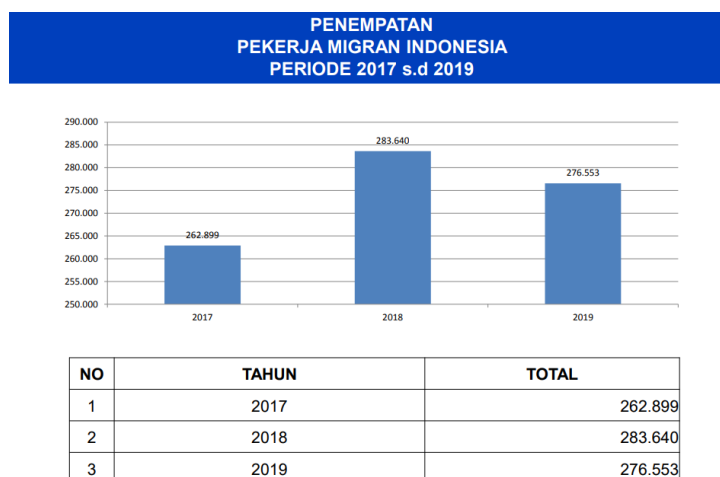
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

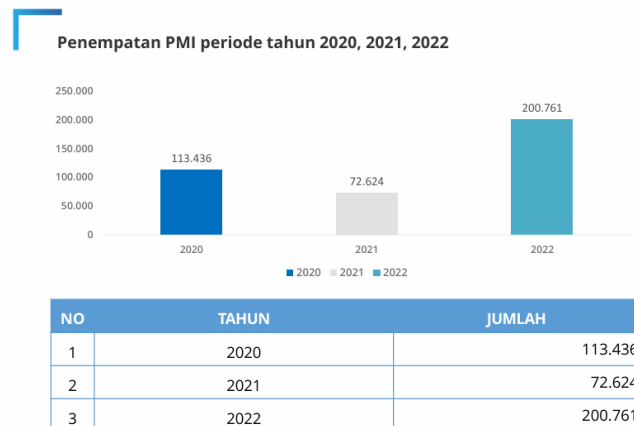
Indonesia merupakan salah satu negara dengan urutan yang cukup tinggi dalam mengirimkan sumber daya manusia yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara belahan dunia. Data menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi untuk bekerja di luar negeri. Banyaknya jumlah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilatarbelakangi karena kurangnya peluang lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyak dari masyarakat Indonesia tidak mendapat kesempatan untuk dapat bekerja di negara sendiri. Pengiriman PMI menjadi salah satu peluang bagi masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi akibat semakin meningkatnya pengangguran di Indonesia, (Ahmad 2020).

Grafik 1 Data Penempatan PMI Tahun 2017-2019



Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Grafik 2 Data Penempatan PMI Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahwa jumlah pengiriman pekerja migran cukup mengalami dinamika, tercatat kurang lebih ada 386.821 pada periode 2020 hingga 2022. Melimpahnya prospek lapangan pekerjaan di Arab Saudi menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu negara tujuan dalam mengirimkan sumber daya manusianya. Arab Saudi menjadi negara penempatan dengan tingkat tertinggi dalam pengiriman PMI yang berjumlah 7.349 orang, diikuti dengan total pengaduan sebanyak 1.123 sepanjang tahun tersebut (BP2MI, 2022). Tidak dapat dipungkiri dari banyaknya sumber daya manusia yang dikirimkan ke Arab Saudi juga ternyata menyimpan banyak problematika yang menyangkut PMI. Di Indonesia sendiri isu ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena terdapat banyak sekali laporan pengaduan dari berbagai pihak. Seperti yang dialami oleh Sulasih binti Sukiran Sadli asal Demak, Jawa Tengah tahun 2020. Ia merupakan Pekerja Rumah Tangga yang saat itu mengalami masa kritisnya di rumah sakit Jeddah. Sulasih mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya di Arab Saudi, penyiksaan tersebut berupa penyiraman air klorin yang dilakukan majikan ke mata Sulasih, sehingga menyebabkan iritasi dan sulit untuk

dibuka. Adapun bentuk penganiayaan lainnya seperti pukulan benda tumpul di muka, alat vital yang diinjak-injak, serta sebagian tangan Sulasih yang disetrika, (BBC 2020).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, (“Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban”, n.d.). Tentunya PMI menjadi salah satu kategori masyarakat yang perlu mendapatkan hak atas perlindungan dari pemerintah Indonesia. Berbagai *stakeholder* turut ambil bagian dalam mengatasi kasus-kasus yang telah menimpa PMI di Arab Saudi, baik dari pemerintah melalui berbagai praktik diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, organisasi non pemerintah atau biasa dikenal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (Purwanti 2022).

Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) merupakan salah satu LSM yang telah didirikan sejak tahun 2009 dengan nama awal Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia, lalu beralih nama di tahun 2015 menjadi Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI). Dikutip melalui laman sosial media (Facebook) Kabar Bumi merupakan Organisasi yang berbasis komunitas yang anggotanya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI), mantan PMI, dan anggota keluarga PMI serta orang-orang yang peduli terhadap perjuangan PMI, tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jenis kelamin, berdasarkan Pancasila UUD 1945. KABAR BUMI terdaftar di KEMENKUMHAM dengan nomor registrasi: AHU - 0078842. AH.01.08 Tahun 2016. LSM ini berfokus pada pembelaan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penanganan kasus yang menimpa mereka melalui praktik advokasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Faktanya kegiatan advokasi tidak hanya dilakukan oleh individu dengan gelar advokat, tetapi juga melibatkan sekelompok lembaga yang secara aktif ikut serta dalam membela masyarakat. Istilah advokasi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk tekanan kepada pemerintah agar terus menjalankan kewenangan dalam melindungi

masyarakatnya. Hal yang sama juga berlaku bagi KABAR BUMI, yang telah melakukan berbagai upaya dalam mengadvokasi isu terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), (Arista 2017).

KABAR BUMI memberikan berbagai bentuk bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia, termasuk memberikan ruang pengaduan bagi PMI, mantan PMI, atau keluarga dari PMI untuk melaporkan kasus yang mereka alami melalui sosmed atau *contact person* KABAR BUMI serta melengkapi identitas pelapor, korban, beserta agen calo yang terlibat dalam proses keberangkatan PMI tersebut. Selanjutnya, kasus-kasus tersebut akan ditindaklanjuti menggunakan data yang valid dan segera mendapatkan pendampingan khusus serta diproses melalui beberapa lembaga berwenang yang terkait. Sesuai dengan prosedur pelaporan, jika korban yang bersangkutan tidak berada di Indonesia, pelapor dapat mengajukan permintaan agar korban dapat dikembalikan ke Indonesia secepat mungkin. Lembaga berwenang yang akan dikunjungi termasuk Direktorat Perlindungan WNI dan KBRI. Banyaknya jumlah kasus pengaduan yang diterima menyatakan bahwa tidak sedikit PMI mengalami masalah yang berujung pada proses hukum, baik dalam kasus ringan maupun berat, (ILO 2022).

Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) menjadi salah satu fokus penelitian penulis karena merupakan LSM yang secara eksklusif terdiri dari mantan pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah mengalami berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik yang bersifat berat maupun ringan. Organisasi ini menjadi penting karena keanggotaannya terdiri dari individu yang memiliki pengalaman langsung dalam merasakan dampak pelanggaran tersebut. Dengan demikian, LSM KABAR BUMI memiliki kepekaan dan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang dihadapi oleh PMI. Anggota LSM KABAR BUMI tidak hanya menjadi korban, tetapi juga berperan aktif dalam menangani masalah yang mereka hadapi. Mereka terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan, advokasi, dan

dukungan kepada sesama PMI yang mengalami pelanggaran hak mereka. Bahkan, sebagian besar dari mereka telah mengalami sendiri pelanggaran tersebut, menjadikan mereka memiliki pemahaman yang unik dan mendalam tentang kondisi sebenarnya di lapangan.

Menariknya, meskipun pentingnya peran KABAR BUMI dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap PMI, belum banyak skripsi yang mengangkat LSM ini sebagai subjek penelitian. Ini menunjukkan bahwa ada celah dalam literatur akademis yang perlu diisi untuk lebih memahami peran dan kontribusi LSM ini dalam advokasi dan perlindungan hak-hak PMI. Melalui penelitian ini, penulis berinisiatif untuk mengangkat LSM KABAR BUMI dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan peran penting LSM tersebut. Diharapkan dengan peningkatan kesadaran ini, masyarakat akan lebih memahami betapa krusialnya peran LSM KABAR BUMI dalam memperjuangkan hak-hak PMI dan menegakkan keadilan bagi mereka yang telah mengalami pelanggaran. Pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kronologi setiap peristiwa yang dialami oleh PMI, seperti yang dipahami oleh anggota LSM KABAR BUMI, akan membantu memperkuat upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran yang serupa terjadi di masa depan.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam melengkapi literatur tentang perlindungan hak-hak PMI, tetapi juga memberikan dorongan positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya advokasi dan perlindungan bagi para pekerja migran. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi PMI, serta upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran HAM di masa mendatang menjadi lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengambil garis besar tentang “Bagaimana Peran dari Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) Dalam Melakukan Advokasi Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2020-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang akan dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran dari *stakeholder* terhadap pekerja migran Indonesia guna penyelesaian karya tulis ilmiah pada jenjang Strata satu (S1) Universitas Islam Indonesia (UII).

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran hak asasi manusia yang dialami pekerja migran indonesia di Arab Saudi.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan advokasi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi 2020-2022.
3. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya upaya advokasi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) pada tahun 2020-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi peran Advokasi Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam melindungi PMI di Arab Saudi selama periode 2020-2022. Penelitian ini mencakup analisis terhadap beberapa aspek, termasuk dinamika

pengiriman pekerja migran Indonesia, perlindungan dan hak pekerja migran serta peran konkret yang dimainkan oleh KABAR BUMI

Penulis memberikan batasan tahun 2020-2022 dimana pada periode tersebut Indonesia sedang mengalami kerentanan PMI di tengah wabah Covid-19, sehingga PMI mengalami berbagai tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Alasan penulis mengambil Arab Saudi sebagai kawasan yang diteliti karena, Arab Saudi menjadi negara nomor satu dengan jumlah pengaduan terbanyak selama periode tahun tersebut. Sehingga penelitian ini juga akan memaparkan upaya Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam memberikan bantuan hukum, dukungan sosial, advokasi kebijakan, serta pemantauan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pekerja migran di tengah pandemi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Merujuk kepada beberapa penulisan kajian mengenai permasalahan pekerja migran Indonesia memberikan inspirasi bagi penulis dalam membuat penelitian ini. Kajian tersebut mengangkat isu permasalahan yang dialami oleh beberapa pekerja migran Indonesia, dengan melibatkan pihak ketiga dalam menyumbangkan peran-perannya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Melalui jurnal yang berjudul “Peran LSM *Migrant CARE* dalam Membantu TKI Bermasalah di Arab Saudi Tahun 2009 dan 2010” karya, (Endang Setyoningsih, Dra. Fitriyah, MA, Dra. Rr. Hermi S, M.Si). Membahas mengenai peran dari salah satu LSM *Migrant Care* dalam memberikan bantuan kepada Pekerja Migran Indonesia yang banyak mengalami masalah di Arab Saudi pada tahun 2009 dan 2010. Isu mengenai PMI bermasalah di Arab Saudi merupakan salah satu isu yang sering terjadi dalam konteks migrasi buruh Indonesia. Jurnal ini memberikan ulasan mengenai peran dari lembaga *non government* tersebut dalam menangani

serta mengulurkan bantuannya kepada para PMI yang mengalami masalah seperti pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan, kekerasan fisik, penahanan ilegal serta hutang piutang, dan berbagai permasalahan lainnya di Arab Saudi pada periode tahun tersebut. Dalam jurnal ini LSM Migrant Care menggambarkan sebuah organisasi non-government yang memiliki fokus pada isu perlindungan dan pemberdayaan PMI. Cakupan penelitian pada jurnal ini berfungsi untuk menganalisis peran dari LSM *Migrant Care* dalam memberikan bantuan terhadap PMI yang mengalami masalah di Arab Saudi sepanjang periode tahun 2009 dan 2010. Pembahasan didalamnya juga meliputi tentang bagaimana aktivitas yang dilakukan lembaga tersebut dalam menangani isu ini diantaranya advokasi nasional maupun internasional, pendampingan hukum, penanganan kasus individu, kampanye kesadaran yang dituju kepada seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah, serta kolaborasi dengan lembaga lain dalam mengoptimalkan bantuan serta perlindungan terhadap PMI yang mengalami masalah, (Ningsih, MA, and M.Si 2013).

Masih berkaitan dengan isu Pekerja Migran Indonesia, jurnal berjudul “Peran *Migrant Care* Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2016” karya Yovi Arista. Yang juga membahas mengenai peran dari LSM *Migrant Care* dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh migran di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam jurnal ini tidak mematok ruang lingkup negara tujuan, dan memiliki penjelasan yang lebih luas mengenai peran dari lembaga tersebut. Isu-isu yang dibahas dalam jurnal ini meliputi perlindungan hukum, hak-hak buruh, kesejahteraan, serta kondisi kerja maupun tantangan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia dalam kurun waktu 2014-2016. Jurnal ini juga mengangkat tentang bagaimana eksplorasi aktivitas advokasi yang dilakukan oleh *Migrant Care* bersama beberapa jejaring sosial seperti pemerintah, lembaga internasional, maupun lembaga swadaya lainnya, (Arista, 2023).

Jurnal penelitian milik Sahda Nabilah Agusta dan Wildan Faisol (2022) berjudul “Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia” penelitian tersebut berisikan rentetan kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kasus dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan dari negara Arab Saudi selaku negara maju yang membutuhkan banyak SDM. hal tersebutlah yang menjadi salah satu peluang pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pengangguran. Jurnal tersebut memaparkan bahwa pengiriman PMI ke Arab Saudi banyak menimbulkan permasalahan seperti gaji tidak dibayar, pelecehan, penganiayaan, hingga pembunuhan yang sering kali dialami oleh PMI. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana upaya negara Indonesia menangani kasus-kasus yang menimpa PMI di Arab Saudi berupa advokasi internasional, serta mediasi yang dilakukan antar pihak bersangkutan, (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022).

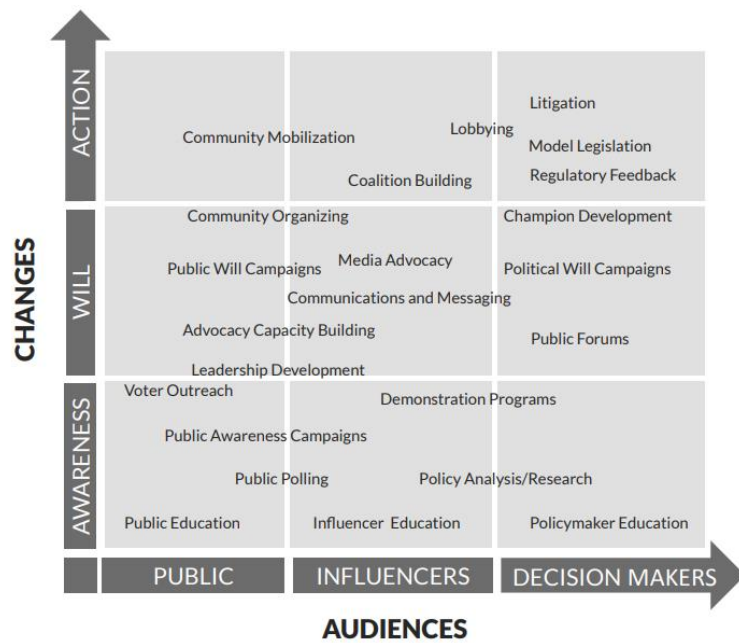
Penelitian milik penulis memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian terdahulu di atas melalui pendekatan atau konsep, objek penelitian, serta cakupan tahun penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan ialah Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) sebagai aktor advokasi. Penelitian ini menggunakan konsep “*The Advocacy Strategy Framework*” karya Julia Coffman dan Tanya Beer sebagai alat untuk menganalisis peran dari aktor tersebut. Penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Peran LSM Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2020-2022” yang memiliki perbedaan cakupan tahun maupun kawasan dengan penelitian terdahulu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) memiliki konsep advokasi terhadap isu pekerja migran Indonesia, serta memberikan layanan bantuan hukum untuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia meliputi (kekerasan seksual, kekerasan verbal, penganiayaan, penyanderaan, serta gaji tidak dibayar). Menyangkut dengan keamanan para pekerja migran Indonesia melalui peran Organisasi Non Pemerintah atau LSM tentunya diperlukan rujukan atau teori dalam membedah isu yang akan diangkat dalam tulisan ini. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori Advokasi dari sudut pandang Julia Coffman dan Tanya Beer Tahun 2015.

Dalam Jurnal “*The Advocacy Strategy Framework*” karya Julia Coffman dan Tanya Beer menjelaskan bagaimana strategi advokasi dalam konsep teori perubahan. Melalui kerangka pemikiran ini, skripsi menyajikan gambaran tentang bagaimana Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), sebagai organisasi yang fokus pada isu-isu migran, merenungkan dan mengartikulasikan proses perlindungan yang diharapkan terjadi bagi pekerja migran Indonesia selama periode tersebut.

Gambar 1. The Advocacy Strategy Framework



Sumber : *The Advocacy Strategy Framework* by Jullia Coffman and Tanya Beer

Jurnal tersebut menjelaskan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menggambarkan strategi advokasi.

a. Audiens (*audiences*)

Audien merupakan individu dan kelompok yang menjadi target strategi advokasi, yang bertujuan untuk memengaruhi atau meyakinkan mereka. Mereka merupakan pemain utama dalam proses kebijakan dan melibatkan berbagai segmen, termasuk

1. Masyarakat umum (atau segmen-segmen khusus dari masyarakat),
2. Pengaruh kebijakan (seperti media, pemimpin komunitas, dunia bisnis, pemimpin pemikiran, penasihat politik, organisasi advokasi lainnya, dan sebagainya), Mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat umum dan pengambil keputusan, seringkali memfasilitasi dialog dan debat publik tentang isu-isu kebijakan.
3. Pengambil keputusan (seperti pejabat terpilih, administrator, hakim, dan lain sebagainya).

Pentingnya peran audien dalam pengaruh kebijakan dan pelaksanaan strategi advokasi tercermin dalam kemampuan strategi ini untuk menargetkan satu atau lebih audien secara bersamaan, tergantung pada sasaran dan tujuan advokasi yang ingin dicapai.

b. Perubahan (*Change*)

Are the results an advocacy effort aims for with audiences to progress toward a policy goal. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa perubahan adalah hasil yang menjadi tujuan dari upaya advokasi, yang bertujuan untuk mendorong audien untuk mengarah ke tujuan kebijakan tertentu. Terdapat tiga tahap dalam kontinum ini yang berbeda dalam hal sejauh mana audien diharapkan terlibat dalam isu kebijakan.

1. Tahap dimulai dengan kesadaran atau pengetahuan dasar. Pada tahap ini, tujuannya adalah membuat audien sadar akan adanya masalah atau solusi kebijakan yang potensial. Pada tahap ini, upaya advokasi berfokus pada menciptakan pemahaman dasar di antara *audiens*.
2. Tahap berikutnya adalah keinginan (*will*). Tahap ini, tujuannya adalah meningkatkan kemauan audien untuk mengambil tindakan terkait suatu isu. Ini melampaui tingkat kesadaran dan mencoba meyakinkan *audiens* bahwa isu tersebut cukup penting untuk dibahas dan bahwa tindakan yang diambil akan benar-benar memiliki dampak.
3. Tahap terakhir adalah tindakan (*action*). Menurut Coffman dan Beer *Changes are the results an advocacy effort aims for with audiences to progress toward a policy goal. The three points on this continuum differ in terms of how far an audience is expected to engage on a policy issue.* Merupakan upaya kebijakan benar-benar mendukung atau memfasilitasi tindakan audien terkait isu tersebut. Pada tahap ini, upaya advokasi fokus pada mendorong audien untuk benar-

benar mengambil tindakan yang nyata dalam mendukung tujuan kebijakan. Advokasi bukan hanya mengenai bagaimana upaya dalam meningkatkan kesadaran saja, tetapi tentang upaya dalam menggerakkan audiens untuk berperan aktif dalam tercapainya sebuah perubahan yang diharapkan

Penting untuk dicatat bahwa strategi advokasi dapat mengejar satu perubahan dengan audien atau lebih dari satu secara bersamaan, tergantung pada sasaran dan tujuan advokasi yang ingin dicapai. Dengan demikian, kontinum ini memberikan kerangka kerja yang membantu merencanakan dan mengukur kemajuan dalam upaya advokasi kebijakan.

Kabar Bumi, sebagai organisasi non-pemerintah memiliki peran sentral dalam jaringan advokasi terkait. Konsep Advokasi dari sudut pandang Julia Coffman dan Tanya Beer, menegaskan bahwa NGO merupakan lembaga yang bergerak secara independen tanpa adanya intervensi politik. Teori tersebut juga memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana keterlibatan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi pada tahun tersebut, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Peran Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) ini melibatkan kerjasama dengan organisasi serta lembaga Internasional maupun domestik yang berfokus pada isu serupa. Penulis juga akan mengangkat bagaimana taktik yang digunakan oleh Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam mempengaruhi kebijakan, bagaimana Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) berkolaborasi dengan aktor lain baik domestik maupun internasional, serta meningkatkan pengaruh masyarakat sipil dalam memperjuangkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, (Coffman and Beer 2015)

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini penulis memiliki argumen sementara dengan menggunakan Teori Advokasi dalam jurnal yang berjudul, “*The Advocacy Strategy Framework*” karya Julia Coffman dan Tanya Beer menjelaskan bagaimana strategi advokasi dalam konsep teori perubahan. Terdapat dua indikator di dalamnya, Audiens (*audiences*) merupakan individu dan kelompok yang menjadi target strategi advokasi, yang bertujuan untuk memengaruhi atau meyakinkan mereka, dan Perubahan (*change*) menjelaskan bahwa perubahan adalah hasil yang menjadi tujuan dari upaya advokasi, yang bertujuan untuk mendorong audien untuk mengarah ke tujuan kebijakan tertentu. Dua indikator tersebut yang nantinya dapat menjawab seluruh rumusan masalah mengenai “Peran LSM Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam melakukan Advokasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2020-2022”.

Banyaknya kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menuai banyak sorotan dari berbagai lapisan masyarakat terutama Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) sebagai lembaga non-pemerintah yang memiliki konsen pada isu pekerja migran Indonesia. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) berperan sebagai jembatan antara PMI dan lembaga-lembaga hukum. Dengan adanya lembaga ini PMI dapat dengan lebih mudah mengakses bantuan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran hak. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) juga menyediakan bantuan sosial seperti Pendidikan bagi PMI yang membutuhkan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah melalui metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinilai sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam

penggunaan metode penelitian kualitatif, penulis tidak terlalu mengandalkan prosedur pengumpulan data yang berbasis angka. Penelitian yang penulis angkat bersifat deskriptif sehingga diperlukan analisis untuk dapat memecahkan masalah yang diangkat dengan mendalam.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) sebagai LSM terkait. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2020-2022. Sehingga penelitian ini akan menganalisis mengenai peran Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam melakukan Perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia tahun 2020-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian sekunder menjadi alat dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini. Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau pihak ketiga yang valid. Sumber pengumpulan data yang digunakan penulis seperti Buku, Jurnal, serta laporan melalui situs resmi.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis akan menggunakan proses penelitian dengan menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dari berbagai sumber resmi dan valid akan diolah menggunakan teori yang telah dinilai cukup relevan dengan isu terkait. Penyajian data dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif sehingga mampu menjelaskan dengan rinci isu yang diangkat melalui metode serta teknik pengumpulan data tersebut.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang sistematis sebagai bentuk alur pemikiran yang kritis dan ilmiah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diantaranya:

Bab I penelitian ini berisikan pendahuluan yang disertai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang akan diaplikasikan dalam penulisan pembahasan.

Bab II akan menyajikan tantangan serta ancaman yang dialami PMI di Arab Saudi, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia pada tahun tersebut, serta memaparkan *background* dari KABAR BUMI.

Bab III penulis akan memaparkan teori Advokasi melalui Jurnal “The Advocacy Strategy Framework” karya Julia Coffman dan Tanya Beer, Serta menganalisis peran LSM Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam melakukan advokasi perlindungan terhadap pekerja migran indonesia di Arab Saudi pada tahun 2020-2022 menggunakan teori tersebut

Bab IV penulis akan menyimpulkan hasil dari seluruh penulisan yang dipaparkan diatas.

BAB 2

TANTANGAN DAN ANCAMAN DALAM KEHIDUPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI

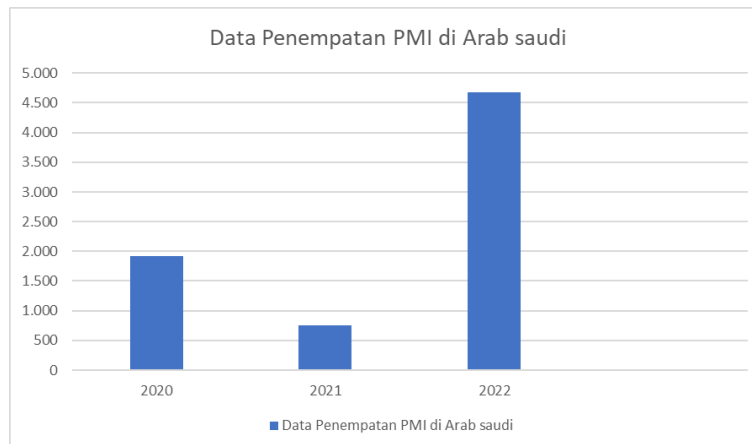
Dalam perjalanan menggali lebih dalam tentang realitas kehidupan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, Bab 2 menjadi penelusuran yang mendalam terhadap tantangan dan ancaman yang melingkupi setiap langkah mereka. Sebagai pelengkap pada prolog sebelumnya yang membahas konteks luas isu perlindungan pekerja migran, bab ini akan membawa pembaca melangkah lebih dekat ke dalam realitas pahit yang dihadapi oleh para pekerja migran. Melalui berbagai aspek mulai dari kondisi kerja yang keras hingga permasalahan hak asasi manusia yang muncul, bab ini bertujuan untuk menguraikan kompleksitas kehidupan sehari-hari pekerja migran Indonesia di tanah Arab Saudi. Dengan memahami dengan jelas tantangan dan ancaman yang dihadapi, kita dapat meresapi kedalaman urgensi perlindungan yang diberikan oleh organisasi non-pemerintah atau LSM Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI). Penulis akan memaparkan mengenai profil dari lembaga KABAR BUMI, yang terdiri dari visi dan misi yang akan menjadi landasan utama kegiatan lembaga KABAR BUMI. Selain itu, akan dipaparkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus dari lembaga KABAR BUMI mengenai berbagai rentetan kasus dari tahun 2020-2022 yang telah ditangani oleh lembaga tersebut, hal ini tentunya akan menunjukkan betapa kompleks dan mendesaknya permasalahan yang kerap kali dialami oleh PMI di negara penempatan khususnya Arab Saudi. Bab ini mengawali perjalanan dengan menguraikan konteks penuh warna tentang bagaimana kehidupan seorang pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dipenuhi dengan berbagai tantangan dan ancaman, sementara mereka berjuang untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

2.1 Identifikasi tantangan dan hambatan yang dialami pekerja migran 2020-2022 di Arab Saudi

Realitas kehidupan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi membuka jendela pandang terhadap dua jalur yang berbeda, yakni jalur formal dan informal. Sektor pekerjaan yang memiliki peminat paling tinggi dalam penempatan PMI di Arab Saudi ialah sektor informal. Pekerja migran yang memilih jalur formal seringkali menikmati keberangkatan yang resmi, dilengkapi dengan kontrak kerja sah dan izin tinggal yang memberikan perlindungan hukum. Mereka cenderung menikmati fasilitas kerja yang lebih baik, termasuk asuransi kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial. Di sisi lain, pekerja migran yang memasuki Arab Saudi melalui jalur informal menghadapi realitas yang berbeda. Tanpa perlindungan resmi, mereka rentan terhadap eksploitasi dan kerja di bawah kondisi yang kurang menguntungkan. Tidak memiliki izin tinggal yang sah juga membuat mereka sulit mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan dan bantuan hukum. Tantangan ini menciptakan disparitas signifikan dalam pengalaman kehidupan antara pekerja migran yang melibatkan diri dalam jalur formal dan informal di Arab Saudi, (BP2MI 2023).

Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Hal ini dapat dilihat melalui sebuah grafik yang dikutip oleh penulis dari situs web resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Grafik 3 Data Penempatan PMI di Arab Saudi



Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

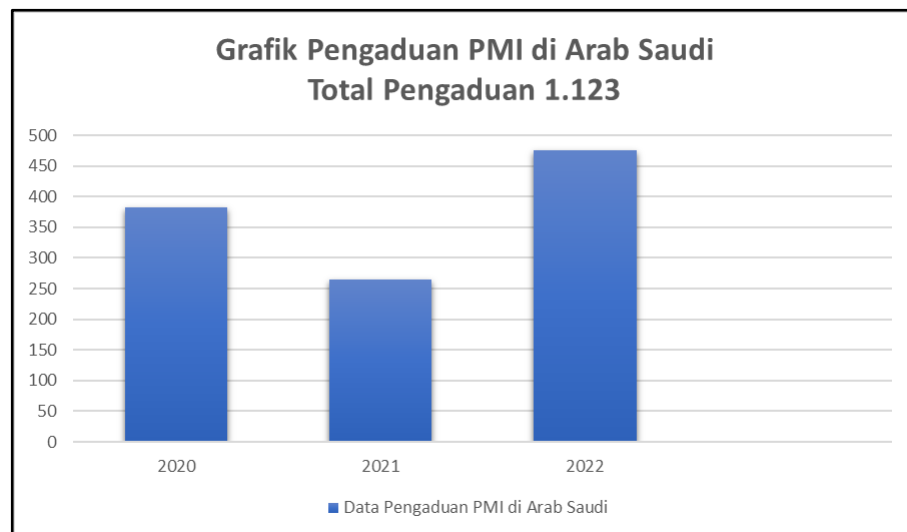
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan tajam di tahun 2020 menuju tahun 2021 selama periode pandemi. Data menyebutkan pada tahun 2020, penempatan PMI di Arab Saudi terdapat 1.926 PMI. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah PMI yang berangkat ke Arab Saudi mengalami penurunan, dengan hanya 747 PMI yang tercatat melalui data BP2MI. Angka ini mengalami penurunan drastis, di mana jumlah PMI yang berangkat ke Arab Saudi biasanya lebih tinggi. Penurunan ini tentunya disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Pembatasan perjalanan internasional, kebijakan lockdown, dan penutupan perbatasan yang diterapkan oleh banyak negara untuk mengendalikan penyebaran virus turut berkontribusi pada penurunan jumlah PMI yang dapat berangkat ke luar negeri. Penurunan ini mencerminkan dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19 yang terus mempengaruhi mobilitas internasional dan perekonomian global. Banyak negara, termasuk Arab Saudi, memberlakukan berbagai kebijakan ketat terkait masuknya pekerja asing untuk mencegah penyebaran virus. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan kesehatan yang disebabkan oleh pandemi membuat banyak calon PMI menunda rencana mereka untuk bekerja di luar negeri, (BP2MI 2023).

Situasi ini berubah pada tahun 2022, Dimana jumlah PMI ke Arab Saudi mengalami peningkatan yang signifikan, dengan total 4.679 PMI yang tercatat berangkat ke Arab Saudi. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan dan adaptasi di tengah kondisi pandemi yang sedang terjadi. Faktor utama yang mempengaruhi peningkatan pengiriman PMI ke Arab Saudi ini merupakan keputusan pemerintah Indonesia yang membuka kembali peluang untuk negara-negara penempatan bagi PMI melalui berbagai pertimbangan. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Keputusan tersebut mengalami perubahan sebanyak 17 kali, mengikuti perkembangan kondisi pandemi dan kebijakan kesehatan yang berlaku di berbagai negara. Fleksibilitas dan respons cepat terhadap perubahan kondisi pandemi memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan penempatan PMI secara dinamis, sehingga memfasilitasi peningkatan penempatan PMI ke negara-negara yang telah membuka perbatasan mereka kembali, termasuk Arab Saudi. Pembukaan kembali negara penempatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi PMI dari risiko penularan COVID-19, (BP2MI 2023).

Peningkatan jumlah PMI yang berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2022 juga didorong oleh berbagai faktor lainnya. Salah satunya adalah perbaikan kondisi ekonomi di Arab Saudi yang kembali membutuhkan pekerja migran dalam mendukung berbagai sektor industri. Melalui penyesuaian kebijakan yang tepat dan cepat terhadap situasi pandemi yang sedang terjadi, pemerintah berhasil memfasilitasi peningkatan jumlah PMI yang dapat bekerja di luar negeri termasuk Arab Saudi. Hal tersebut tentunya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi para PMI dan keluarga, tetapi juga mendukung perekonomian Indonesia melalui remitansi yang mereka kirimkan.

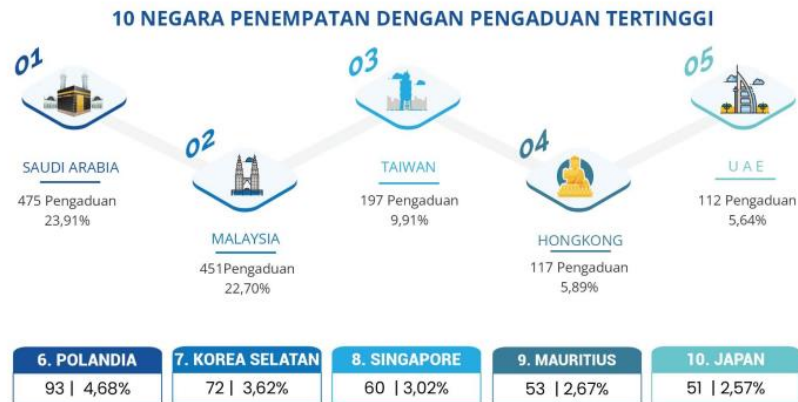
Secara keseluruhan grafik data penempatan PMI ke Arab Saudi tersebut dari tahun 2020 hingga 2022 memberikan dampak yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 terhadap arus migrasi PMI di Arab Saudi. Penurunan tajam dari tahun 2020 menuju tahun 2021 diikuti oleh peningkatan yang pesat pada tahun 2022, menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan pulih dari krisis yang sempat terjadi. Keputusan pemerintah yang terus diperbarui untuk mengakomodasi perubahan situasi pandemi memainkan peran penting dalam meningkatkan penempatan PMI ke Arab Saudi dan negara-negara lainnya, (BP2MI 2023).

Grafik 4. Pengaduan PMI di Arab Saudi Total Pengaduan 1.123



Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Gambar 2. 10 Negara Penempatan Dengan Pengaduan Tertinggi



Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Data pengaduan PMI di Arab Saudi dari tahun 2020, 2021, 2022 menunjukkan tren yang tidak stabil, namun signifikan dalam jumlah pengaduan yang diterima. Pada periode tahun tersebut terdapat total 1.123 pengaduan yang tercatat melalui BP2MI, hal tersebut, menjadikan Arab Saudi sebagai negara dengan jumlah pengaduan terbanyak pada periode tersebut.

Tahun 2020 merupakan permulaan Pandemi, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan pada tanggal 2 maret 2020 merupakan kasus covid-19 pertama di Indonesia, kondisi ini membawa dampak besar terhadap kehidupan para pekerja migran di seluruh dunia, termasuk Arab saudi. Pada tahun ini terdapat 383 pengaduan yang diterima pemerintah Indonesia dari PMI di Arab Saudi. Pandemi mengakibatkan munculnya masalah baru sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengaduan. Adapun faktor utama yang mempengaruhi tingginya jumlah pengaduan pada tahun 2020 ini diantaranya adalah pembatasan mobilitas dan *lockdown*, Arab Saudi menerapkan berbagai pembatasan ketat untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19. Hal ini tentunya menyebabkan banyak pekerja migran Indonesia kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja. Pembatasan mobilitas juga menyulitkan mereka untuk mencari bantuan atau bahkan melarikan diri di tengah situasi kerja

yang buruk. Faktor selanjutnya adalah kondisi kerja yang memburuk, dimana kondisi pandemi ini mempengaruhi ekonomi global, terdapat banyak Perusahaan dan majikan di Arab Saudi mengalami kesulitan finansial. Beberapa dari mereka mengambil tindakan dengan melakukan pemotongan gaji atau bahkan tidak membayar gaji sama sekali. Kondisi tersebut juga memicu banyaknya pengaduan dari PMI yang masuk kedalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Faktor terakhir ialah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, dimana pada kondisi ini Masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai, tetapi akses ke layanan kesehatan ini sering kali terbatas terutama bagi para pekerja migran Indonesia. Banyak dari pekerja migran melaporkan kurangnya perlindungan kesehatan serta ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai, (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2021).

Pada tahun 2021, jumlah pengaduan yang masuk menurun menjadi 265 pengaduan. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa banyak PMI menghadapi berbagai tantangan di tempat kerja mereka. Beberapa alasan penurunan jumlah pengaduan pada tahun ini ialah adanya Adaptasi terhadap Kondisi Pandemi. Seiring berjalannya waktu, baik PMI maupun majikan mulai menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Beberapa majikan mulai menerapkan protokol kesehatan yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja mereka. Faktor berikutnya ialah Kebijakan Pemerintah yang lebih ketat, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak PMI. Upaya diplomasi dan advokasi dari pemerintah dan NGO juga berkontribusi pada peningkatan perlindungan bagi PMI. Dengan adanya pembatasan perjalanan internasional dan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, jumlah PMI yang berangkat ke luar negeri, termasuk ke Arab Saudi, menurun. Hal ini tentunya mengurangi jumlah pengaduan yang diterima. Namun, hal tersebut tidak bisa dipungkiri meskipun dalam jumlah pengaduan mengalami penurunan di tahun 2021 masih banyak PMI yang mengalami

masalah serius. Pengaduan tentang gaji tidak dibayar, pelecehan yang kerap kali melanda PMI Perempuan, dan kondisi kerja yang buruk. Penurunan ini mungkin lebih mencerminkan adaptasi terhadap situasi yang ada daripada penyelesaian masalah yang sebenarnya, (BP2MI 2023).

Tahun 2022 terdapat peningkatan pengaduan yang signifikan dalam jumlah pengaduan dari PMI di Arab Saudi, dengan total 475 pengaduan. Peningkatan ini tentunya menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan kondisi, banyak masalah mendasar yang belum terselesaikan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pengaduan pada tahun 2022 antara lain, adanya pembukaan kembali perbatasan dengan meredanya beberapa pembatasan covid-19 dan dibukanya kembali perbatasan, jumlah PMI yang berangkat ke Arab Saudi pun terus meningkat di tahun ini sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pengaduan. Faktor berikutnya terlihat ketika adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi, dimana banyak dari pekerja migran memiliki ekspektasi bahwa situasi di masa covid ini sudah membaik. Tetapi kenyataan di lapangan berbalik, dimana terdapat banyak masalah tetap ada. Ketidakpuasan terhadap kondisi ini pun memicu adanya pelanggaran hak yang berakibat pada meningkatnya jumlah pengaduan di tahun 2022. Kondisi ekonomi yang belum stabil juga menjadi faktor pendorong terhadap meningkatnya jumlah pengaduan PMI di Arab Saudi sehingga berdampak kepada pembayaran gaji serta kondisi kerja PMI, (BP2MI 2023).

Secara keseluruhan, grafik pengaduan PMI di Arab Saudi selama periode 2020-2022 tersebut menunjukkan bahwa pandemi covid-19 memiliki dampak yang signifikan pada kondisi dan kesejahteraan PMI di Arab Saudi. Meskipun terdapat penurunan pengaduan di tahun 2021, peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat banyak masalah mendasar yang belum terselesaikan. Pemerintah dan NGO memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah pengaduan dan meningkatkan kondisi kerja bagi PMI.

Beberapa langkah yang telah diambil meliputi regulasi dan kebijakan, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi untuk melindungi PMI, termasuk menetapkan standar kerja dan gaji yang layak. Kebijakan ini harus terus disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk memastikan efektivitasnya. Terdapat penyediaan layanan bantuan hukum serta dukungan dari Pemerintah dan NGO bagi PMI yang sedang mengalami masalah. Layanan yang disediakan ini termasuk bantuan hukum, akses kesehatan, serta dukungan psikososial. Kampanye kesadaran dilakukan dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak PMI melalui kampanye Pendidikan dan pelatihan juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO. Program ini tentunya membantu PMI dalam memahami hak-hak mereka dan cara melaporkan pelanggaran. Peran berikutnya ialah kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah dan NGO di negara tujuan untuk melakukan peningkatan perlindungan dan kondisi kerja bagi PMI. Kerjasama ini meliputi perjanjian bilateral, pertukaran informasi dan program pelatihan.

Melalui salah satu kasus yang penulis kutip dari laman resmi (Facebook) KABAR BUMI. Kondisi ini dialami perempuan dengan inisial GN (44) di Arab Saudi yang sudah hilang kontak selama masa Pandemi kurang lebih 3 tahun. Koordinasi awal dilakukan oleh anak sulung GN di Indonesia dengan menghubungi KABAR BUMI, sebagai organisasi masyarakat atau LSM yang *concern* dalam penanganan atau advokasi PMI.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga sejak tahun 2004 GN sudah menjadi PMI, saat itu GN genap berusia 26 Tahun. Di Tahun 2016 GN memilih cuti 2 minggu hingga kembali ke negara tujuan ia bekerja. Anak GN yang berinisial RM menyampaikan bahwa ibu nya sudah hampir 4 tahun tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi melalui berbagai macam cara. Tepat di tanggal 16 februari 2022 LSM KABAR BUMI

mengirimkan surat kepada perwakilan diplomat Kemlu RI yaitu Bapak Judha Nugraha perihal memberikan bantuan untuk penanganan kasus hilang kontak PMI di Arab Saudi.

Tidak hanya melalui Kemlu saja tetapi juga surat tersebut dikirimkan ke beberapa badan pemerintah lainnya seperti KBRI Arab Saudi dan kemnaker untuk mempertemukan GN kepada keluarganya di Indonesia. Melalui pemaparan yang disampaikan oleh keluarga GN, dikatakan bahwa GN berangkat melalui calo/sponsor yang bernama H. Duki asal kampung Kedondong Cirebon, tetapi ketika hendak dikonfirmasi nyatanya calo tersebut sudah meninggal dunia. Melalui proses *calling* visa diperkirakan GN berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2004 atau 2005, GN sempat beberapa kali mengirimkan uang kepada keluarganya yang ada di Indonesia sebelum ia hilang kontak. Kemudian pada tanggal 13 April 2022 melalui staff dari PWNI KEMLU menghubungi pihak dari Pengurus KABAR BUMI berkoordinasi berhasil menemukan kontak GN dalam keadaan baik-baik. Berdasarkan surat yang ditujukan kepada pihak KABAR BUMI, staff PWNI KEMLU mengatakan bahwa GN akan segera mengambil cuti untuk berkumpul kembali dengan keluarganya (KABAR BUMI, n.d.).

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran KABAR BUMI dalam membantu PMI dan keluarganya mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. KABAR BUMI berfungsi sebagai jembatan antara PMI dan pemerintah, memastikan bahwa hak-hak PMI terlindungi dan mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi situasi sulit.

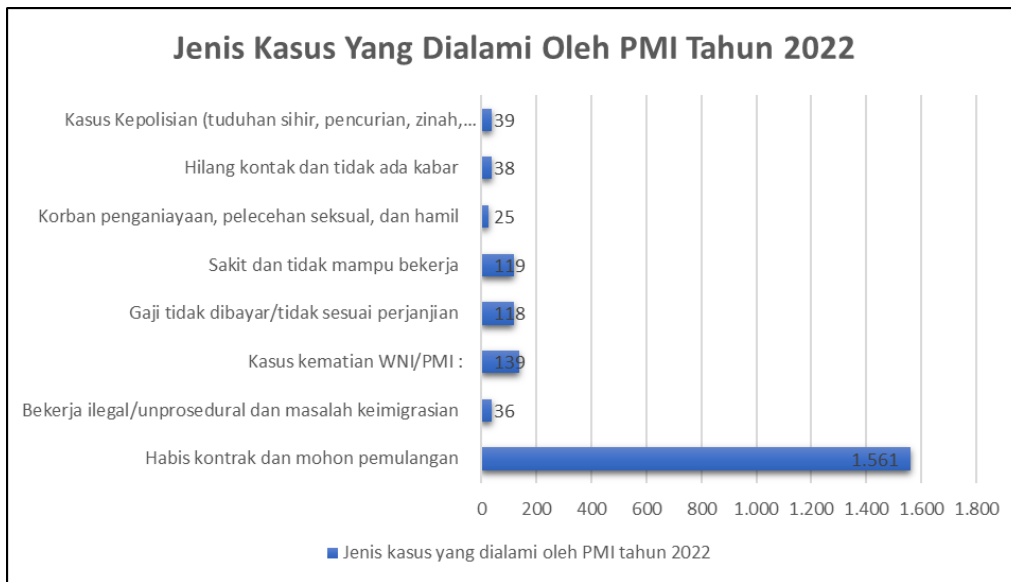
Mayoritas PMI di Arab Saudi diberangkatkan melalui jalur resmi seperti LPK atau P3MI yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia. Jalur resmi menawarkan beberapa keuntungan bagi pihak PMI seperti. Proses yang lebih terjamin dan aman, LPK dan P3MI resmi diawasi oleh pemerintah Indonesia dan sudah mengikuti standar serta regulasi yang telah ditetapkan. Proses tersebut dilakukan pemerintah untuk memastikan pemberangkatan dari setiap PMI dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Untuk memadai kebutuhan SDM yang

diperlukan di negara tujuan, LPK sebagai lembaga penyalur juga menyediakan pelatihan keterampilan serta orientasi pra-pemberangkatan bagi setiap calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi. PMI yang diberangkatkan melalui jalur resmi akan memiliki kontrak kerja yang jelas dan telah diakui oleh pemerintah Indonesia, sehingga dapat dengan mudah mengakses layanan BP2MI, seperti pendampingan, pengaduan, hingga pendampingan hukum guna menjamin keselamatan saat di negara penempatan, (P3MI, 2022).

Meskipun terdapat berbagai keuntungan, tidak sedikit dari PMI yang memilih untuk berangkat melalui jalur mandiri dengan berbagai alasan beragam. Calon PMI tersebut menilai bahwa melalui jalur mandiri proses pemberangkatan umumnya akan lebih cepat dibandingkan melalui LPK atau P3MI serta menghemat biaya pemberangkatan ke Arab Saudi. Beberapa diantara mereka beranggapan bahwa biaya pemberangkatan resmi melalui LPK atau P3MI jauh lebih mahal dibandingkan dengan jalur mandiri. Alasan lainnya, beberapa PMI yang sudah memiliki keluarga atau kenalan di Arab Saudi dinilai dapat membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, (Skaut and Triputro, n.d.).

Namun, penting untuk diingat bahwa jalur mandiri memiliki banyak risiko yang dapat mengancam keselamatan PMI, diantaranya. Tingginya potensi penipuan yang akan menimpa calon PMI, tidak sedikit oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan jalur mandiri untuk menipu calon PMI. Kurangnya perlindungan hukum dari negara karena PMI yang berangkat melalui jalur mandiri tidak memiliki kontrak kerja yang jelas dan diakui oleh pemerintah Indonesia, hal tersebut akan berakibat pada rentannya kasus eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang akan menimpa PMI. PMI juga akan kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan BP2MI, (BP2MI 2023).

Grafik 5. Jenis Kasus Yang Dialami PMI Tahun 2022



Sumber : Buku LKJ KBRI Riyadh Tahun 2022

Dalam data yang tertuang melalui grafik Jenis kasus yang dialami oleh PMI di tahun 2022, PMI menghadapi tantangan yang menunjukkan kompleksitas serta kerentanan mereka saat bekerja di luar negeri. Grafik tersebut menunjukkan warna khusus yang mengkhawatirkan, mulai dari tuduhan pidana hingga masalah kesejahteraan yang serius. Kasus-kasus ini tidak hanya menyoroti risiko hukum dan keselamatan yang tengah dihadapi PMI, tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak akan perlindungan dan layanan yang lebih baik., (Kedutaan besar Republik Indonesia Riyadh, n.d.,).

Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan KBRI Riyadh, serta bagaimana peran dari para stakeholder lainnya seperti KABAR BUMI, dalam membantu kasus-kasus PMI. Kebijakan yang seharusnya kuat dan koordinasi yang efektif antara pemerintah patut ditekankan demi meminimalisir risiko yang dihadapi PMI serta memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi mereka yang bekerja di luar negeri.

2.2 Kebijakan Pemerintah Terhadap PMI di Masa Covid

Selama masa pandemi tahun 2020-2022, Pemerintah Indonesia telah secara aktif melaksanakan berbagai tindakan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap PMI. Langkah-langkah yang diambil mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh PMI di tengah kondisi yang tidak pasti kala itu.

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan serta penanganan terhadap masalah yang dialami oleh PMI di luar negeri. Dalam rangka menanggulangi permasalahan yang seringkali menimpa PMI, pemerintah menetapkan undang-Undang No. 18/2017 tentang perlindungan PMI. Dalam UU tersebut, peran pemerintah daerah menjadi dominan dalam PMIB. Hal tersebut mencakup peningkatan pengetahuan serta wawasan di tingkat organisasi perangkat daerah hingga level desa, serta pemberdayaan bagi PMI purna dan keluarga melalui Program desa Migran Produktif (Desmigratif) serta Kewirausahaan. Pemerintah juga mendorong pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) untuk memastikan efektivitas dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI. LSTA tersebut akan mengkoordinasi dalam fungsi layanan yang meliputi kependudukan, ketenagakerjaan, keimigrasian, kesehatan, perbankan, serta BPJS Ketenagakerjaan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan PMI bekerja sesuai dengan prosedur yang sesuai, memiliki dokumen legal, serta terhindar dari tindak pidana perdagangan orang.

Selama masa Covid-19, pemerintah Indonesia juga aktif dalam mengatur kepulangan pekerja migran Indonesia yang berdampak, baik melalui jalur darat, udara, maupun laut, serta PLBI. Tercatat sejak awal periode 2020 hingga Juli 2020 sudah ribuan PMI telah kembali ke Tanah Air melalui berbagai jalur tersebut. Pemerintah juga melakukan program-program penempatan tenaga kerja ke luar negeri, serta memberikan sertifikasi bagi calon PMI yang telah mengikuti pelatihan kerja, (KEMENKO PMK 2020).

Selain itu salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah memperkuat Program *Government to Government* (G2G) sebagai langkah untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI. Program ini didesain untuk mengatur penempatan serta perlindungan PMI dengan lebih terstruktur dan aman, sehingga risiko eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap PMI dapat diminimalkan. Dalam program G to G, pemerintah juga melakukan pembebasan biaya terhadap PMI, biaya tersebut diantaranya ialah biaya preliminary terhadap pekerjaan tertentu, biaya tiket keberangkatan hingga pulang, visa kerja, pelatihan kerja, legalitas kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, jaminan sosial PMI, pengganti paspor, transportasi, pemeriksaan kesehatan, akomodasi, hingga biaya penempatan PMI yang memiliki 10 jenis jabatan rentan. Pemerintah memberikan support pembiayaan melalui pemberian modal kerja dalam bentuk KUR PMI. Peningkatan anggaran sebesar Rp 390 miliar, peningkatan pinjaman dari Rp25 juta menjadi Rp100 juta, hingga perubahan terhadap metode pencairan KUR PMI sesuai tahapan proses penempatan PMI tersebut juga menjadi upaya pemerintah dalam melanggengkan program G to G, (KEMENKO PEREKONOMIAN 2022).

Dalam Peringatan Hari Migran Internasional tahun 2022, Pemerintah Indonesia turut aktif dalam memberikan perlindungan serta dukungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui kegiatan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah meresmikan Unit Layanan Disabilitas sektor Ketenagakerjaan Disnakertrans NTB yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi PMI. Selain itu, Pemerintah juga memberikan penghargaan berupa “Indonesia *Migrant Worker Award 2022*” kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi signifikan dalam perlindungan serta pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI), (DISNAKERTRANS, 2022).

Menjadi pekerja migran di luar negeri merupakan sebuah langkah besar, hal tersebut tentunya memerlukan persiapan matang serta pemahaman menyeluruh mengenai prosedur dan hak yang dimiliki. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan serta regulasi yang

dikeluarkan oleh KBRI Riyadh, berkomitmen untuk memastikan kepada setiap calon PMI dapat bekerja secara legal dan aman. Terdapat panduan yang disusun sebagai referensi penting untuk memberikan informasi rinci dan terstruktur mengenai setiap tahapan yang harus dilalui oleh calon PMI, tahap tersebut meliputi proses pendaftaran, pra-keberangkatan, penempatan, hingga kepulangan. Panduan yang ditetapkan oleh KBRI Riyadh ini diharapkan dapat meminimalkan risiko serta menghindari jebakan rekrutmen ilegal yang kerap mengancam keselamatan dan kesejahteraan PMI. Melalui panduan ini pula, calon PMI akan dipandu mengenai hak apa saja yang mereka dapatkan dan apa bentuk kewajibannya, prosedur yang benar, serta langkah-langkah perlindungan yang harus diambil untuk memastikan pengalaman bekerja di luar negeri yang aman.

Dijelaskan melalui web resmi KBRI Riyadh, PMI yang sudah tiba kembali di Indonesia dan memiliki masalah seperti kekerasan atau penipuan, mereka akan diarahkan ke Pos Pelayanan PMI untuk pemeriksaan dan pelayanan lebih lanjut mengenai masalah yang mereka alami. Bantuan yang bisa diperoleh meliputi pelayanan kesehatan, konsultasi psikologi, bantuan hukum, pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan mata pencaharian. PMI harus memastikan menerima semua gaji sebelum pulang, menyimpan dokumen penting, dan melaporkan jika tidak menerima layanan di Pos Pelayanan PMI yang tersedia. Hal tersebut menekankan bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai pentingnya pendaftaran resmi, mengikuti prosedur yang benar, mematuhi hukum negara penempatan, dan melaporkan setiap masalah yang dihadapi selama penempatan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan bagi para PMI Arab Saudi, selain itu (KBRI Riyadh 2024).

Kementerian Luar Negeri republik Indonesia juga menyediakan Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, terdapat tiga layanan yang tersedia di portal tersebut. Portal tersebut merupakan sebuah platform yang dirancang untuk memberikan berbagai layanan penting bagi WNI yang ada di luar negeri khususnya Arab Saudi. Tujuan dari adanya portal ini untuk memastikan seluruh WNI terutama PMI di Arab Saudi merasa terjamin keselamatannya, serta kemudahan akses dalam berbagai situasi dan kebutuhan, (KEMLU RI, n.d.).

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di luar negeri, masih terdapat sejumlah tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi. Meskipun regulasi dan program-program yang ada memberikan landasan yang kuat, namun masih terlihat adanya celah dan kebutuhan akan upaya tambahan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Seiring dengan kompleksitas dan dinamika dunia kerja global, serta berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang, diperlukan upaya tambahan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga LSM, sektor swasta, dan masyarakat secara luas. Melalui kerja sama lintas sektor dan komunitas, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan bagi para pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai regulator dan pelaksana program masih perlu ditingkatkan dan didukung dengan berbagai inisiatif lain yang melibatkan berbagai pihak.

2.3 Peran dan Profil Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)

Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) didirikan tahun 2009 merupakan sebuah organisasi massa yang menghimpun Puruh Migran Indonesia (PMI), purna migran Indonesia, calon PMI, keluarga PMI, dan para pendukung isu PMI tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jenis kelamin, berdasarkan Pancasila UUD 1945. KABAR BUMI terdaftar di KEMENKUMHAM dengan nomor registrasi: AHU -0078842.

AH.01.08 Tahun 2016. LSM ini berfokus pada pembelaan hak-hak PMI dan penanganan kasus yang menimpa mereka melalui praktik advokasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

KABAR BUMI memberikan berbagai bentuk bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia, termasuk memberikan ruang pengaduan bagi PMI, mantan PMI, atau keluarga dari PMI untuk melaporkan kasus yang mereka alami melalui email, menghubungi secara personal, atau dengan mengunjungi kantor KABAR BUMI serta melengkapi identitas pelapor, korban, beserta agen calo yang terlibat dalam proses keberangkatan PMI tersebut.

Tujuan-tujuan tersebut tersusun melalui visi dan misi yang ada di laman resmi KABAR BUMI diantaranya ialah :

1. Untuk mewujudkan perlindungan sejati bagi PMI dan keluarganya
2. Meningkatkan kesejahteraan bagi PMI dan keluarganya
3. Seluruh PMI dan keluarganya mendapatkan hak sosial ekonomi, dan politik dari negara
4. memperjuangkan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan PMI dan keluarganya di seluruh dunia pada umumnya
5. memberikan pendidikan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dan negara-negara penempatan dan persoalan-persoalan yang berdampak terhadap PMI, serta mengembangkan kampanye untuk menolaknya
6. menyatukan dan mengkoordinasi PMI di negara-negara tujuan lain untuk memajukan hak-hak dan kesejahteraan PMI dimanapun berada dan masyarakat Indonesia tertindas umumnya
7. menggalang kerjasama dengan organisasi-organisasi lain dari berbagai negeri, (KABAR BUMI, n.d.).

Melalui tujuan khusus yang telah dipaparkan di atas dari lembaga Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia, penulis melakukan proses pengambilan data melalui wawancara

bersama salah satu pengurus KABAR BUMI. Marni Sulastri, SH. merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia yang saat ini menjadi Koordinator Lembaga Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) untuk wilayah NTB. Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah dengan jumlah PMI terbanyak untuk tujuan Arab Saudi.

Melalui hasil wawancara dengan Marni, penulis menemukan berbagai kasus pelanggaran HAM yang pada realitanya menimpa PMI di Arab Saudi pada periode tahun 2020-2022. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis, penahanan tanpa proses hukum yang jelas, penipuan gaji, pemulangan PMI yang bermasalah, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi. Sebagai seorang pengurus di KABAR BUMI.

Pada tahun 2021, KABAR BUMI menangani kasus kematian seorang wanita berusia di bawah 40 tahun, belum menikah, dari Kecamatan Seteluk NTB, yang meninggal di Arab Saudi. Wanita tersebut telah berstatus ilegal karena sebelumnya ia sempat keluar dari rumah majikan lama dan mencari majikan baru tanpa melalui prosedur resmi. Setelah kabur, kemudian ia mendapatkan pekerjaan baru namun berstatus ilegal, yang menyulitkan proses pemulangan jenazahnya ke Indonesia.

KABAR BUMI melakukan berbagai cara dari mulai konfirmasi dan pelaporan kepada BP2MI serta DISNAKERTRANS Daerah untuk memulangkan jenazah PMI. Namun, proses ini menghadapi kendala karena status ilegal wanita tersebut, serta ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pemulangan jenazah. Ketika berusaha memulangkan jenazah, keluarga wanita tersebut memutuskan untuk mengizinkan pemakaman di Arab Saudi, sesuai dengan pandangan mereka tentang proses pemakaman akan lebih baik jika dilakukan secara cepat.

Selama penanganan kasus ini, KABAR BUMI menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak korban. KABAR BUMI akhirnya menghubungi kerabat korban yang juga bekerja di

Arab Saudi untuk berkoordinasi mengenai pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Tetapi, sesuai dengan keinginan keluarga untuk melakukan pemakaman di Arab Saudi, akhirnya dilakukan lah oleh kerabat korban tersebut mulai dari mengurus administrasi hingga berlangsungnya pemakaman jenazah. Kasus ini menunjukkan bahwa banyak kesulitan yang sering dihadapi ketika PMI berstatus ilegal dan tidak memiliki hubungan formal dengan majikan baru, tentunya membuat koordinasi dengan KBRI dan pihak berwenang menjadi rumit.

Terdapat kasus menonjol di tahun 2022, yang melibatkan seorang PMI bernama Suraini dari Desa Banjar, Kabupaten Sumbawa Barat, ia sudah dilaporkan hilang sejak tahun 2015. Selama hampir satu dekade Suraini tidak berkomunikasi dengan keluarganya di NTB, yang menyebabkan keluarganya tersebut mengira Suraini hilang atau meninggal. KABAR BUMI akhirnya melakukan pencarian, hingga di tahun 2022 itu mereka menemukan kabar bahwa ternyata, Suraini bekerja di sebuah desa terpencil di Arab Saudi dan tidak digaji oleh majikan selama ia bekerja, bahkan majikan melarangnya untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

Kasus ini terungkap ketika Suraini bersama majikannya mengunjungi KBRI untuk memperpanjang paspornya yang habis masa berlaku. Setelah mengetahui kabar tersebut, KABAR BUMI melakukan koordinasi bersama KBRI dan BP2MI untuk memulangkan Suraini ke Indonesia. Melalui kasus ini, korban memang tidak mengalami kekerasan secara fisik, tetapi ia mengalami tekanan secara psikologis yang signifikan karena adanya larangan-larangan yang dilakukan oleh majikannya di Arab Saudi.

Kerjasama yang dilakukan oleh keluarga besar buruh Migran (KABAR BUMI) dan BP2MI dalam proses pemulangan PMI mengalami kendala yang cukup kompleks. Menurut penuturan Marni, KBRI di Arab Saudi hanya akan menerima komunikasi dari pihak yang telah dipercaya oleh PMI, sementara PMI hanya percaya kepada anaknya yang masih dibawah umur.

Kebijakan dari KBRI tersebut diambil untuk menghindari penipuan, mengingat ada banyak pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari PMI yang telah lama bekerja di luar negeri dan sudah mengumpulkan gaji.

Pentingnya peran KABAR BUMI dalam menjembatani komunikasi dan memberikan advokasi tidak bisa diremehkan. KABAR BUMI bertindak sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik dan memastikan bahwa PMI mendapatkan perlindungan yang layak. KABAR BUMI berperan dalam menghubungkan PMI dengan keluarga mereka di Indonesia, serta bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BP2MI dan KBRI, untuk memastikan bahwa hak-hak PMI tetap terjaga.

Adanya kasus seperti ini menunjukkan bahwa banyak PMI seringkali merasa tertindas oleh keluarganya sendiri yang kemudian menyebabkan permasalahan internal yang cukup kompleks. KABAR BUMI seringkali berperan sebagai mediator dalam permasalahan yang kerap dialami oleh PMI atau bahkan keluarga PMI. Meskipun yang terjadi pada kasus ini ternyata merupakan kasus Internal yang dialami oleh keluarga PMI, KABAR BUMI membantu untuk memastikan apakah hak-hak dari PMI yang menjadi korban tersebut tetap terjaga serta membantu meleraikan permasalahan tersebut yang terjadi akibat jarak dan misinformasi.

Dapat dilihat melalui rentetan kasus diatas, KABAR BUMI memainkan peran penting untuk menjembatani serta memfasilitasi PMI dengan berbagai pihak terkait seperti Disnakertrans, BP2MI, dan KBRI. KABAR BUMI sebagai LSM yang berdiri diluar instansi resmi tentunya tidak memegang kebijakan pemerintah, lembaga ini berfokus dalam membantu pemenuhan hak-hak PMI dan keluarga PMI serta penyelesaian kasus-kasus yang mereka hadapi

Ketika menerima pengaduan dari PMI atau keluarga PMI, KABAR BUMI berperan sebagai penghubung dengan pihak-pihak berwenang. Mereka membantu keluarga untuk dapat

memahami bagaimana prosedur yang diperlukan, serta mengarahkan PMI atau keluarga PMI kepada instansi terkait yang dapat memberikan bantuan lebih lanjut. KABAR BUMI juga memfasilitasi komunikasi antara PMI yang berada di Arab Saudi dengan majikan mereka. Jika terdapat konflik yang mengharuskan berkomunikasi secara langsung, maka KABAR BUMI akan mencoba untuk berbicara dengan majikan mereka melalui telepon seluler, mereka memastikan tidak adanya miskomunikasi yang bisa memperburuk situasi antara PMI dengan majikannya.

Selain itu, KABAR BUMI juga menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur pidana di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menyangkut pidana adalah permasalahan PMI dengan calo yang melakukan penipuan terhadap para PMI, memberangkatkan PMI secara ilegal. Pada kasus seperti ini, KABAR BUMI menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian untuk memberikan solusi yang adil dan tuntas melalui proses hukum. Peran KABAR BUMI bukan hanya terbatas pada PMI yang berada di luar negeri, tetapi juga meluas kepada keluarga mereka yang ada di Indonesia. Terdapat banyak kasus yang melibatkan anak-anak PMI. Kasus-kasus seperti ini seringkali terabaikan karena orang tua mereka yang bekerja di luar negeri. terdapat satu contoh kasus yang pernah ditangani oleh KABAR BUMI adalah kasus pembacokan yang melibatkan anak PMI. dalam kasus ini baik pelaku, korban, bahkan saksi merupakan anak-anak PMI, ketiganya tidak mendapatkan perhatian penuh dari orang tua mereka. Hal tersebut dilatarbelakangi karena ibu dari anak-anak tersebut merupakan PMI. Pada kasus ini, KABAR BUMI mendampingi proses hukum serta memastikan bahwa hak-hak anak-anak tersebut dilindungi. KABAR BUMI melakukan pertemuan dengan pihak berwenang serta keluarga terkait. Semua dukungan dikerahkan oleh LSM ini dalam membantu penyelesaian kasus tersebut. Adanya kasus tersebut memperlihatkan bahwa KABAR BUMI juga berperan dalam mendukung kesejahteraan keluarga PMI yang kerap kali terabaikan, terutama yang menimpa anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, KABAR BUMI berperan secara komprehensif. Bukan hanya penyelesaian kasus-kasus yang dialami oleh PMI di Arab Saudi, tetapi juga lembaga ini memberikan dukungan penuh terhadap keluarga PMI. Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh KABAR BUMI seperti, mediasi, dukungan hukum, komunikasi, serta pendampingan sosial, lembaga ini berupaya untuk memastikan hak-hak PMI dapat tersalurkan. KABAR BUMI membantu untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial antara keluarga PMI dan berbagai instansi terkait, meskipun mereka sendiri tidak memiliki otoritas resmi atau kebijakan hukum. KABAR BUMI juga menyediakan seminar-seminar mengenai pentingnya informasi bagi keluarga PMI. mereka berupaya untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai hak-hak serta prosedur yang perlu diikuti ketika berhadapan dengan masalah. Hal ini tentunya dilakukan oleh KABAR BUMI agar PMI dan keluarga PMI tidak kebingungan serta dapat mengambil langkah tepat ketika dihadapkan dengan masalah yang sulit.

Dalam kasus yang menimpa anak-anak PMI, KABAR BUMI juga memberikan perhatian khusus. Mereka memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perhatian khusus, baik pada aspek Pendidikan, Kesejahteraan sosial, serta Pendidikan. Kasus-kasus tersebut kerap kali mengakibatkan situasi yang menjadi kompleks, hal tersebut tentunya memerlukan pendekatan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan untuk anak-anak.

“kita akan menjadi jembatan karena keluarga kan yang mengadu ke kita, maka kami akan membantu bagaimana memfasilitasi keluarga dengan pihak yang terkait, seperti Disnakertran, Bp2MI, KBRI peran kami disitu. Karena kami ini kan swadaya, diluar instansi dan kami bukan pemegang kebijakan, kami hanya membantu apa yang dibutuhkan keluarga PMI. Jadi kami akan mencoba.”

BAB 3

ADVOKASI KELUARGA BESAR PEKERJA MIGRAN INDONESIA (KABAR BUMI) DI ARAB SAUDI

Dalam Bab 3 dari penelitian ini akan membahas secara menyeluruh mengenai LSM Keluarga Besar Buruh Migran (KABAR BUMI). Sebagai sebuah organisasi yang sangat berkomitmen terhadap perjuangan hak-hak PMI serta keluarganya, tentunya lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian atas perlindungan PMI. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan analisis peran-peran spesifik yang dilakukan oleh KABAR BUMI pada periode tahun tersebut, baik dalam segi advokasi, pemberian bantuan hukum, pendidikan serta pemberdayaan terhadap pekerja, dan mantan PMI, hingga melakukan hubungan kerjasama dengan stakeholder lainnya dalam upaya perlindungan terhadap PMI, mantan PMI, dan keluarga PMI Arab Saudi sesuai dengan *Advocacy Theory Framework* karya Jullia Coffman and Tanya Beer Tahun 2015.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang spesifik mengenai kontribusi yang signifikan oleh KABAR BUMI dalam memberikan dukungan serta perlindungan PMI di Arab Saudi.

3.1 Pendekatan The Advocacy Strategy Framework dalam Perlindungan PMI oleh KABAR BUMI di Arab Saudi (2020-2022)

Konsep advokasi yang dikembangkan oleh Jullia Coffman dan Tanya Beer melalui jurnal *The Advocacy Strategy Framework* (2015) merangkum upaya serta beberapa proses dalam mendukung serta merekomendasikan kebijakan. Adapun yang termasuk didalamnya ialah kegiatan aktivisme serta advokasi kebijakan. Apabila KABAR BUMI mampu memberikan dampak terhadap kebijakan negara, maka akan memunculkan keberhasilan dalam upaya perlindungan PMI di Arab Saudi. Fokus penulis dalam penelitian ini ialah untuk melihat

bagaimana upaya Kabar Bumi sesuai dengan konsep strategi advokasi melalui teori advokasi perubahan terkait perannya dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di Arab Saudi 2020-2022. Melalui konsepnya, Jullia Coffman dan Tanya Beer (2015) menjelaskan dua indikator advokasi strategy diantaranya, Audiensi (*audiences*) dan perubahan (*change*) yang meliputi tiga tahapan yakni, kesadaran (*awarness*), keinginan (*will*), dan tindakan (*action*). Melalui konsep advokasi strategy, penulis akan memaparkan analisis yang terperinci berdasarkan data-data yang ada. Data-data tersebut meliputi kasus-kasus yang ditangani oleh Kabar Bumi serta bagaimana alur penyelesaian kasus tersebut, sehingga menghasilkan adanya perubahan kebijakan baru. Dengan menganalisis data-data tersebut tentunya akan memperlihatkan bagaimana strategi yang digunakan oleh Kabar Bumi sebagai LSM, yang salah satu fokus nya meliputi perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi PMI di Arab Saudi. Pembahasan di bawah akan menjelaskan bagaimana KABAR BUMI memainkan perannya melalui konsep-konsep dasar teori advokasi, apakah sudah sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Julia Coffman dan Tanya Beer, (Coffman and Tanya Beer 2015).

Terdapat kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan strategi advokasi. Kerangka kerja berikut disusun berdasarkan dua dimensi utama dari strategi advokasi, yaitu target audien (*audiences*) sumbu X sebagai target dan Perubahan yang diinginkan (*changes*) sumbu Y.

Terdapat dua indikator yang dijelaskan dalam teori Advocacy Strategy Framework.

3.1.1 Audiens (*Audiences*)

Melalui pengelolaan indikator audiens ini menunjukan siapa yang menjadi target utama KABAR BUMI dalam isu terkait. Indikator berikut akan mengklasifikasi beberapa audiens yang ditargetkan oleh KABAR BUMI dalam strategi advokasinya terhadap perlindungan PMI di Arab Saudi tahun 2020-2022, (Coffman and Beer 2015).

1. Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang meliputi PMI, mantan PMI, dan keluarga PMI merupakan audiens utama yang menjadi target advokasi KABAR BUMI. Pendekatan terhadap kelompok ini didasarkan pada pemahaman bahwa mereka merupakan kelompok yang paling terdampak. Berdasarkan hasil wawancara pengambilan data dengan salah satu pengurus Kabar Bumi, lembaga tersebut menyadari pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak PMI dan isu-isu migrasi di Arab Saudi.

Menurut Coffman dan Beer, advokasi kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan merubah perilaku masyarakat, sehingga memperkuat dukungan publik terhadap isu tertentu. KABAR BUMI menggunakan strategi komunikasi dan kampanye publik dalam meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat sipil mengenai isu PMI di Arab Saudi, (Coffman and Beer, 2015).

2. Pemberi Pengaruh Kebijakan

KABAR BUMI menargetkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan serta pengaruh dalam membuat atau mengubah kebijakan yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan PMI di Arab Saudi. Aktor-aktor tersebut seperti DISNAKERTRANS, BP2MI, KBRI, KBRI Riyadh dan pejabat pemerintah lainnya.

Menurut konsep Advocacy Theory by Jullia Coffman dan Tanya Beer, advokasi yang efektif kepada pemangku kebijakan memerlukan pemahaman yang sangat mendalam mengenai isu PMI Arab Saudi. Hal tersebut meliputi, identifikasi siapa saja pemangku kebijakan yang bergerak dalam isu tersebut,

KABAR BUMI perlu untuk memahami posisi mereka dalam isu perlindungan PMI di Arab Saudi, membuka dialog serta menjelaskan fakta-fakta seperti apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan sehingga dapat lebih berpihak pada perlindungan PMI di Arab Saudi.

Indikator ini merupakan salah satu tahapan strategi advokasi yang penting dalam mencapai meningkatkan perlindungan terhadap PMI serta pemahaman publik yang merata, bukan hanya kepada calon PMI, PMI dan mantan PMI, tetapi juga tersampaikan dengan baik kepada para pemangku kebijakan, (Coffman and Beer 2015).

3. Pengambil Keputusan

Mencakup individu-individu memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan penting, seperti pejabat terpilih, administrator, hakim, dan lain-lain.

KABAR BUMI menargetkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan serta pengaruh dalam membuat atau mengubah kebijakan yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan PMI di Arab Saudi. Aktor-aktor tersebut seperti DISNAKERTRANS, BP2MI, KBRI, KBRI Riyadh dan pejabat pemerintah lainnya.

Indikator ini merupakan salah satu tahapan strategi advokasi yang penting dalam mencapai meningkatkan perlindungan terhadap PMI serta pemahaman publik yang merata, bukan hanya kepada calon PMI, PMI dan mantan PMI, tetapi juga tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan.

3.1.2 Perubahan (Change)

Indikator ini menjelaskan bahwa perubahan adalah hasil yang menjadi tujuan dari upaya advokasi, yang bertujuan untuk mendorong audien untuk mengarah ke tujuan kebijakan tertentu. Terdapat tiga tahap dalam indikator ini yang berbeda dalam hal sejauh mana audien diharapkan terlibat dalam isu kebijakan.

1. Kesadaran (*awaranness*)

Pada tahap ini, upaya advokasi berfokus pada menciptakan pemahaman dasar di antara audien, Membangun rasa kesadaran terhadap semua lapisan penting untuk dilakukan. KABAR BUMI menjadikan Media Sosial sebagai wadah dalam memberikan informasi seputar PMI hingga kasus-kasus PMI di Arab Saudi yang tengah mereka dampingi.

Gambar 2. Akun Resmi Instagram KABAR BUMI



Sumber: <https://www.instagram.com/kabarbumipusat>,

diakses pada Tahun 2024.

Gambar diatas memperlihatkan KABAR BUMI mengunggah informasi melalui media sosial Instagram seputar hak-hak perlindungan yang bisa

didapatkan oleh setiap PMI. Dalam postingannya menjelaskan Organisasi Perburuhan Internasional dalam buku perlindungan & Pencegahan untuk PMI (2006) menyebutkan bahwa PMI yang bekerja di luar negeri terutama Arab Saudi rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti pelanggaran kontrak kerja, terbatasnya kebebasan untuk bergerak, kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk, pelecehan dan kekerasan, resiko kesehatan dan keselamatan, dan kurangnya perlindungan sosial. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2017 terdapat ketentuan dalam mengatur perlindungan PMI yang meliputi perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Melalui pasal 7 dan 8 yang mencakup perlindungan administratif dan teknis, termasuk kelengkapan dan keabsahan dokumen serta penetapan kondisi dan syarat kerja.

Terdapat dua klasifikasi yang sesuai dengan upaya yang telah dilakukan oleh KABAR BUMI, diantaranya :

a. *Public Education* (Pendidikan Publik)

KABAR BUMI secara aktif mengedukasi masyarakat umum mengenai isu-isu yang dihadapi oleh PMI, terutama mereka yang bekerja di Arab Saudi. Mereka menggunakan media sosial seperti Instagram untuk menyebarkan informasi mengenai hak-hak PMI, risiko yang dihadapi, serta berbagai kasus pelanggaran yang telah terjadi. Langkah ini penting untuk membangun kesadaran dasar di kalangan masyarakat umum, PMI, mantan PMI, dan keluarga PMI. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, KABAR BUMI berharap dapat mengubah perilaku masyarakat untuk lebih mendukung isu-isu perlindungan PMI.

b. *Public Awareness Campaigns* (Kampanye Kesadaran Publik)

KABAR BUMI juga melaksanakan kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak PMI dan masalah yang mereka hadapi di Arab Saudi. Melalui berbagai postingan di media sosial, mereka memberikan informasi yang relevan dan penting, termasuk mengenai perlindungan yang seharusnya diterima oleh PMI sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. Kampanye ini dirancang untuk menggerakkan masyarakat umum agar lebih peduli dan mendukung upaya perlindungan PMI.

2. **Keinginan (*will*)**

Dalam konteks ini, upaya KABAR BUMI dalam membangkitkan keinginan masyarakat dan anggota organisasi mereka menjadi sangat penting, terutama terhadap isu perlindungan PMI, khususnya Arab Saudi yang menjadi topik pembahasan.

Upaya KABAR BUMI tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tantangan yang dihadapi PMI di Arab Saudi, tetapi juga memotivasi mereka agar berani dalam mengambil tindakan. Indikator “*will*” ini melibatkan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh KABAR BUMI dalam mendorong audiens mereka, baik masyarakat umum, PMI, mantan PMI, keluarga PMI, hingga pemangku kebijakan, agar lebih aktif dalam isu perlindungan PMI. Peningkatan angka pengaduan PMI di Arab Saudi, KABAR BUMI melihat betapa pentingnya mengubah kesadaran pasif audiens menjadi keinginan aktif untuk bertindak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marni Sulastri, lembaga ini melakukan pengumpulan data melalui laporan-laporan dari PMI yang bermasalah untuk meminta bantuan kepada KABAR BUMI. Kasus-kasus yang mereka tangani kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yakni “Modul Panduan Penanganan & Pendampingan Kasus Pekerja Migran Indonesia”.

Gambar 3. Modul Panduan Penanganan & Pendampingan Kasus Pekerja Migran Indonesia



Sumber: <https://www.instagram.com/kabarbumipusat>,

diakses pada Tahun 2024.

Penerbitan modul ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan panduan yang komprehensif serta berkelanjutan. Modul ini bukan hanya sebuah alat sumber informasi, melainkan sebagai alat yang dirancang untuk meningkatkan kemauan audiens sehingga dapat terlibat aktif dalam penanganan terkait isu PMI bermasalah serta pemberian layanan kepada para PMI. Modul ini dapat dijadikan sebagai panduan praktis dan teoritis yang mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan baik dari anggota KABAR BUMI, masyarakat umum, dan para pendamping kasus yang membutuhkan.

Modul ini berisikan pengalaman langsung KABAR BUMI dalam penanganan isu terkait pekerja migran. Berdasarkan penuturan Marni Sulastri melalui acara launching modul yang diadakan pada 27 November 2021, ia mengungkapkan bahwa di NTB yang merupakan wilayah jangkauannya terdapat banyak kasus PMI yang data nya dimanipulasi terutama PMI di Arab Saudi yang mendominasi wilayah tersebut. PMI ini seringkali tidak menyadari bahwa sejak awal mereka sudah menjadi korban TPPO. Manipulasi ini diantaranya mencakup pemalsuan identitas, usia, atau informasi kontrak, sehingga termasuk ke dalam situasi kerja yang eksploitatif dan sangat berbahaya karena tidak adanya perlindungan yang memadai. Kasus ini tentunya menunjukkan bahwa PMI tersebut sudah memasuki kategori rentan dan tereksplorasi sejak awal proses perekrutan hingga penempatan. Dengan mendokumentasikan dan menyusun modul ini KABAR BUMI memberikan dorongan nyata kepada setiap audiens eksternal untuk berperan aktif. Upaya ini menunjukkan bahwa tindakan yang mereka ambil akan memiliki dampak nyata baik dalam jangka waktu pendek atau bahkan jangka yang panjang. Modul ini menjadikan kerangka HAM dan keadilan gender sebagai dasar penulisannya, sehingga menambah elemen moral dan etis dalam mendorong upaya tindakan. Adapun tujuan selanjutnya modul ini ialah untuk mempermudah alur koordinasi dalam penanganan kasus antara KABAR BUMI dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga memberikan keyakinan kepada audiens bahwa partisipasi mereka dalam proses ini akan lebih mudah dan berdampak positif bagi perlindungan PMI di Arab Saudi.

Terdapat dua klasifikasi yang relevan berdasarkan peran yang dilakukan oleh KABAR BUMI dalam tahapan *will*, diantaranya:

a. *Community Organizing* (Pengorganisasian Komunitas)

KABAR BUMI berusaha mengorganisir komunitas PMI, mantan PMI, dan keluarga mereka untuk menciptakan keinginan bersama dalam mendukung perlindungan PMI. Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan pelatihan untuk memberdayakan komunitas ini. Dengan membangun solidaritas dan dukungan dari dalam komunitas, KABAR BUMI berharap dapat menciptakan dorongan yang kuat untuk perubahan.

b. *Advocacy Training* (Pelatihan Advokasi)

KABAR BUMI juga memberikan pelatihan advokasi kepada anggota komunitas dan relawan. Pelatihan ini mencakup berbagai topik seperti hak-hak PMI, cara menangani kasus, dan strategi advokasi. Dengan meningkatkan kapasitas individu-individu dalam komunitas, KABAR BUMI berusaha menciptakan agen-agen perubahan yang dapat memperjuangkan hak-hak PMI secara efektif, .

Upaya KABAR BUMI dalam *Community Organizing* dan *Advocacy Training* saling melengkapi dan berkontribusi pada tujuan utama untuk membangkitkan keinginan masyarakat untuk melindungi PMI. Dengan menciptakan kesadaran dan membangun solidaritas di dalam komunitas, serta meningkatkan kapasitas individu melalui pelatihan, KABAR BUMI tidak hanya

mampu menghadapi tantangan yang ada tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk perlindungan PMI di masa depan

Indikator “*will*” berperan sangat penting dalam strategi advokasi yang dilakukan oleh KABAR BUMI dalam mendorong audiens agar turut andil dalam perlindungan PMI di Arab Saudi. Berdasarkan modul yang disusun melalui pengalaman yang berdasarkan fakta, KABAR BUMI berhasil menciptakan alat yang tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong motivasi audiens untuk mengambil tindakan yang berarti sehingga diharapkan dapat menciptakan perubahan nyata dalam perlindungan PMI terutama PMI di kawasan Arab Saudi.

3. Tindakan (*action*)

Pada tahap ini, upaya advokasi fokus pada mendorong audien untuk benar-benar mengambil tindakan yang nyata dalam mendukung tujuan kebijakan. Analisis indikator ini menyoroti pentingnya suatu tindakan dalam upaya advokasi yang dilakukan oleh KABAR BUMI. Kebijakan yang sedang diusulkan harus didukung serta difasilitasi untuk mendorong seluruh audiens dalam mengambil langkah nyata.

Penulis juga akan mengangkat bagaimana taktik yang digunakan oleh KABAR BUMI dalam mempengaruhi kebijakan, bagaimana Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) berkolaborasi dengan aktor lain baik domestik maupun internasional, serta meningkatkan pengaruh masyarakat sipil dalam mewujudkan aktivitas nyata memperjuangkan perlindungan terhadap PMI, (Coffman and Beer, 2015).

KABAR BUMI mengambil langkah strategis dalam mengikutsertakan pemerintah secara langsung melalui lobbying serta workshop. Advokasi yang melibatkan pemerintah harus diatur dan dirancang dengan strategi yang matang, didukung dengan informasi yang valid, komunikasi yang efektif, serta mobilisasi yang terkoordinasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mempengaruhi suatu kebijakan.

KABAR BUMI merupakan lembaga yang bergerak di bidang advokasi perlindungan PMI. Lembaga ini kerap kali menyuarakan isu-isu terkait PMI terutama PMI di Arab Saudi yang banyak sekali mengalami masalah ketenagakerjaan.

Gambar 4. Akun Resmi Instagram KABAR BUMI



Sumber: <https://www.instagram.com/kabarbumpusat>,

Pidato Karsiwen di pertemuan stakeholder IMRF di PBB pada 16 Mei 2022 memberikan gambaran yang kuat mengenai tantangan serius yang dihadapi oleh PMI, khususnya mereka yang menjadi pekerja di Arab Saudi.

Sebagai ketua KABAR BUMI, Karsiwen menyoroti masalah utama yang sering dialami oleh PMI, seperti penahanan dokumen oleh agen penempatan dan majikan di luar negeri, yang sangat mempengaruhi hak-hak dan kesejahteraan mereka. Karsiwen mengungkapkan bahwa penahanan dokumen, diantaranya paspor dan kontrak kerja, merupakan masalah yang cukup kompleks dan umum terjadi, terutama di kalangan pekerja perempuan yang bekerja sebagai PRT. Praktik seperti ini tidak hanya menjadi indikasi pelanggaran hukum saja, tetapi juga menempatkan pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan, hal ini membuat mereka tidak memiliki akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan sosial pendampingan yang seharusnya mereka dapatkan di negara penempatan, (KABAR BUMI 2022).

Jika dilihat melalui sudut pandang advokasi perlindungan PMI yang dilakukan oleh KABAR BUMI, pidato yang disampaikan oleh KABAR BUMI ini menunjukkan seberapa serius dan mendesak masalah yang dihadapi oleh PMI di Arab Saudi dan negara-negara lain. KABAR BUMI berperan penting dalam menyuarakan isu-isu ini dengan mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang merata. Karsiwen, dalam pidatonya, menekankan pentingnya pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain untuk mematuhi Konvensi PBB mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya. Tentu, upaya yang dilakukan ini merupakan bagian dari advokasi yang lebih besar untuk memastikan setiap PMI memiliki hak atas dokumen identitas mereka sendiri dan tidak menjadi korban dari penahanan ilegal yang dapat merugikan mereka. Advokasi KABAR BUMI tidak hanya berfokus tentang permasalahan hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi. Pasalnya, Karsiwen juga menyoroti kebutuhan implementasi “Kontrak Mandiri”,

tentunya dapat membebaskan PMI dari jeratan hutang yang dibebankan oleh agen penempatan PMI itu sendiri. Pidato ini juga menggarisbawahi terdapat kekurangan dalam keterlibatan organisasi akar rumput seperti KABAR BUMI dalam proses konsultasi terkait *Global Impact for Migration* (GCM) oleh pemerintah. meskipun terdapat rekomendasi dari Sekjen PBB untuk terus memantau penerapan GCM, faktanya mekanisme yang ada tidak memungkinkan partisipasi yang jelas dan transparan dari organisasi migran. Hal ini tentunya menjadi bentuk kesenjangan antara kebijakan global dan pelaksanaannya di tingkat nasional dan lokal, (KABAR BUMI 2022).

Melalui penyampaian yang dilakukan oleh KABAR BUMI dalam sidang PBB mencerminkan bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh PMI. Upaya advokasi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan langsung dengan pemerintah dan lembaga internasional dalam menciptakan kebijakan yang benar-benar memberikan perlindungan yang utuh terhadap PMI sehingga menjauhkan dari pelanggaran HAM dan eksploitasi. Advokasi KABAR BUMI di Arab Saudi, sebagaimana tercermin dalam pidato ini, adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk memastikan bahwa pekerja migran dilindungi secara hukum dan diberdayakan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi, (KABAR BUMI 2022).

Terdapat contoh yang akurat dalam indikator *action* ini seperti aksi dalam memperjuangkan perubahan UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri menjadi UUPMI. KABAR BUMI dalam usahanya membangun koalisi dengan lembaga swadaya serta aktor lain yang memiliki tujuan selaras dalam perlindungan PMI.

Mobilisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu yang tengah dihadapi buruh migran. Seperti yang telah dijelaskan diatas, aksi tersebut meliputi penyuluhan, seminar, serta kampanye media untuk menarik perhatian publik dalam rangka mendorong terjadinya perubahan undang-undang.

Sepanjang tahun 2020-2022 bahkan hingga saat ini KABAR BUMI kerap kali melakukan aksi rutin, terutama ketika peringatan hari-hari penting seperti hari buruh. Hal ini merupakan bentuk nyata dalam upaya mendorong pemerintah untuk tetap menyadari bahwa perjuangan dalam memberikan perlindungan terhadap PMI belum usai. Aksi ini meliputi demonstrasi hingga pernyataan sikap dalam menuntut implementasi Undang-undang PPMI dengan baik dan sesuai. Adapun tuntutan yang dilakukan diantaranya :

1. Bebaskan PMI & keluarganya dari kekerasan dan perbudakan modern
2. Hentikan kekerasan dan eksploitasi PMI
3. Hentikan TPPO dan Perdagangan Manusia
4. Hentikan penahanan dokumen & berikan sanksi berat bagi PT/Agen pelaku
5. Hapuskan overcharging & berlakukan kontrak mandiri bagi PMI
6. Hentikan migrasi paksa
7. Ciptakan lapangan kerja.

Hari Migran Internasional merupakan pengakuan perlindungan Migran dan keluarganya yang tertuang dalam konvensi PBB 1990 dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang pada UU No.6 Tahun 2012. Namun sampai saat ini setelah diratifikasi oleh pemerintah, implementasinya masih jauh dari perlindungan. persoalan yang dihadapi masih sangat kompleks

terlebih selama masa pandemic kondisi PMI semakin tereksplotasi. Dari data kasus yang ditangani oleh KABAR BUMI untuk wilayah Arab Saudi yang diantaranya Penahanan dokumen, pemalsuan data, hilang kontak, overcharging, pemulangan jenazah, asuransi, tidak digaji, dll. Dari semua kasus tersebut setiap orang mengalami lebih dari tiga kasus sekaligus, ini merupakan bentuk kekerasan berlapis pada PMI terutama pada perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender. Secara keseluruhan melalui temuan penelitiannya, KABAR BUMI menemukan 7 dari 10 orang PMI mengalami penahanan dokumen di Indonesia dan negara penempatannya terutama untuk arab saudi dengan pengaduan terbanyak dalam kurun waktu tersebut. Penahanan dokumen terjadi untuk meyakinkan PMI membayarkan biaya penempatan. Meskipun sudah jelas yang tertera dalam UU PPMI No.18 Tahun 2017 menyatakan bahwa PMI tidak boleh dikenakan biaya/zero cost. sampai saat ini pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada niat untuk merealisasikan *zero cost*, (Human Right Working Group 2023).

Analisis upaya KABAR BUMI dalam konteks Mobilisasi Komunitas dan Lobbying, serta bagaimana kedua pendekatan ini mendukung tindakan nyata dalam advokasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

A. Community Mobilization (Mobilisasi Komunitas)

Mobilisasi komunitas adalah penggerakan masyarakat untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung advokasi perlindungan PMI. KABAR BUMI bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan tindakan di kalangan masyarakat guna mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah lebih efektif dalam melindungi PMI. Aksi demonstrasi yang dilakukan pada Hari Buruh Nasional adalah salah satu

contoh konkret dari mobilisasi ini. Dengan berkumpul dan bersuara, KABAR BUMI menekankan urgensi perlindungan PMI dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk merespons isu-isu yang ada.

KABAR BUMI menggunakan strategi mobilisasi yang mencakup penyuluhan, seminar, dan kampanye untuk menarik perhatian publik terhadap masalah yang dihadapi PMI. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dalam komunitas PMI dan keluarga mereka. Mobilisasi ini melibatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lain, sehingga menciptakan gerakan yang lebih besar dan berdampak. Dengan meningkatkan kesadaran publik, mobilisasi komunitas berpotensi mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat bersatu dan bersuara, mereka dapat menciptakan tekanan yang signifikan untuk mendorong perubahan kebijakan. KABAR BUMI berusaha untuk membuat isu perlindungan PMI menjadi perhatian utama di tingkat publik dan politik, sehingga mendorong aksi nyata dari pemerintah.

B. Lobbying

KABAR BUMI melakukan langkah strategis melalui lobbying dengan mengadakan workshop yang melibatkan pemerintah dan lembaga internasional. Dengan cara ini, mereka dapat menyampaikan isu-isu kritis yang dihadapi PMI, seperti penahanan dokumen dan overcharging. Melalui pertemuan dengan stakeholders, seperti pidato Karsiwen di pertemuan IMRF di PBB, KABAR BUMI menyoroti isu-isu serius yang dihadapi PMI dan meminta tindakan dari pemerintah. Lobbying memungkinkan KABAR BUMI untuk berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik yang lebih berpihak pada perlindungan PMI. Dengan mendokumentasikan dan menyuarakan masalah yang dihadapi PMI, mereka berusaha untuk menciptakan

perubahan yang dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia di antara PMI. KABAR BUMI menekankan pentingnya pemenuhan Konvensi PBB mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan hak-hak PMI. KABAR BUMI juga berusaha untuk melibatkan lembaga internasional dalam advokasi mereka. Hal ini memberikan dukungan tambahan untuk upaya mereka dalam mempengaruhi kebijakan domestik dan menciptakan tekanan internasional terhadap pemerintah. Dengan membangun jaringan dengan lembaga internasional, KABAR BUMI dapat mengakses lebih banyak sumber daya dan memperluas jangkauan advokasi mereka, (Coffman and Beer, 2015.,).

Advokasi KABAR BUMI pada tahun 2020-2022 menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Lembaga ini bekerja untuk mengungkap serta menangani berbagai kasus eksploitasi yang dialami oleh PMI di Arab Saudi, mendokumentasi pelanggaran yang dialami oleh PMI di Arab Saudi, memberikan bantuan serta pendampingan hukum. KABAR BUMI menyoroti adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi, terutama negara-negara dengan jumlah kasus pengaduan tertinggi seperti Arab Saudi, .

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji strategi advokasi yang diterapkan oleh Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi pada tahun 2020-2022, dengan mengacu pada konsep *Advocacy Strategy Framework* yang dikembangkan oleh Jullia Coffman dan Tanya Beer. Berdasarkan analisis terhadap pendekatan dan indikator yang dijelaskan dalam kerangka kerja ini, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik:

Dalam indikator Audiens, KABAR BUMI secara efektif menargetkan audiens yang beragam dalam strategi advokasinya. Diantaranya Masyarakat umum, termasuk PMI dan keluarga PMI, serta pengaruh kebijakan seperti DISNAKERTRANS, BP2MI, dan KBRI. Melalui diadakannya kampanye publik, mereka berhasil meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak PMI dan masalah-masalah yang dihadapi di Arab Saudi.

Melalui indikator analisis kedua yakni Perubahan dalam bagian pertama yakni (*Awariness*), KABAR BUMI berhasil menciptakan kesadaran yang lebih besar terhadap kalangan Masyarakat mengenai isu yang dihadapi PMI diantaranya, penahanan dokumen, pemalsuan data, kekerasan berbasis gender. Sosial media dan Publikasi, seperti penerbitan modul tentu menjadi peran penting dalam tahap ini. Bagian kedua ialah Keinginan (*will*), merupakan bagian dalam upaya membangkitkan kemauan setiap audiens yang menjadi target untuk dapat terlibat aktif sehingga menghasilkan dampak positif. Modul panduan dan publikasi lainnya mendorong partisipasi aktif untuk upaya peningkatan dukungan dalam perlindungan PMI. Bagian terakhir yakni Tindakan (*action*) dimana KABAR BUMI bukan hanya fokus pada kesadaran publik saja, tetapi juga pada tindakan nyata, seperti usaha lobbying, penyuluhan,

hingga demonstrasi. Mereka berupaya untuk aktif dalam memobilisasi Masyarakat sipil dan lembaga terkait dalam mendukung adanya perubahan kebijakan serta implementasi UU PPMI.

Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung perlindungan PMI, seperti UU No.18 Tahun 2017 yang menyatakan *zero cost*, implementasinya masih jauh dari memadai. Kasus-kasus seperti penahanan dokumen dan overcharging masih umum terjadi. KABAR BUMI mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan ini dengan mendokumentasikan pelanggaran dan menyoroti kebutuhan akan reformasi kebijakan yang lebih efektif. Advokasi KABAR BUMI telah membawa perubahan signifikan dalam peningkatan kesadaran dan motivasi terkait isu PMI, serta mempengaruhi kebijakan perlindungan pekerja migran. Dengan memanfaatkan data dan pengalaman lapangan, mereka berhasil mendorong dialog dengan pemangku kebijakan dan masyarakat luas, serta mengarahkan perhatian pada permasalahan kritis yang dihadapi PMI di Arab Saudi.

Secara keseluruhan, KABAR BUMI memainkan peran kunci dalam upaya perlindungan PMI melalui pendekatan advokasi yang terstruktur dan strategis. Meski telah ada kemajuan, tantangan besar masih tetap ada, mereka masih menghadapi tantangan yang besar, terutama terkait kasus di Arab Saudi ini. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses yang kerap kali membatasi kemampuan mereka dalam memberikan bantuan secara langsung. Keterbatasan ini dikarenakan hambatan birokrasi serta minimnya dukungan dari otoritas setempat, begitupun sulitnya menjangkau PMI yang berada di daerah terpencil Arab Saudi, serta mereka yang dalam pengawasan ketat majikan. KABAR BUMI terus mengupaya keterbatasan ini, advokasi harus terus dilanjutkan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik dan implementasi kebijakan yang lebih efektif untuk PMI di Arab Saudi dan negara penempatan lainnya.

4.2 Rekomendasi

Melalui hasil pengambilan data yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa terdapat beberapa rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh salah satu pengurus KABAR BUMI, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendampingan Hukum di Negara Penempatan

Sangat penting bagi negara untuk memberikan pendampingan hukum yang memadai bagi pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di Arab Saudi. Mengingat fakta bahwa PMI seringkali terlibat dalam masalah hukum yang tidak mereka lakukan, mereka memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak mereka tidak terabaikan dan mereka tidak menjadi korban kekeliruan hukum. Negara atau KBRI harus memberikan pendampingan hukum yang nyaman tanpa membuat PMI merasa terlindungi dan aman saat berbicara tentang masalah mereka.

2. Negara harus menghindari menjadi calo atau agen tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengurus KABAR BUMI, Dengan perubahan nama dari PJTKI menjadi BP3MI, penting untuk diingat bahwa institusi ini tidak boleh menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan cara yang dapat menjerumuskan PMI ke dalam situasi eksploitasi atau perdagangan orang. Negara harus memastikan bahwa institusi terkait hanya memfasilitasi penempatan kerja yang sesuai dan tidak mendorong peluang kerja yang berpotensi merugikan PMI.

3. Program Pendidikan dan Dukungan untuk Keluarga Migran

Mengingat peran ekonomi yang besar mereka dan kerentanan yang mereka hadapi, setiap daerah harus memiliki program khusus untuk membantu keluarga pekerja migran. Untuk memastikan keluarga migran tidak terabaikan, program ini dapat mencakup BPJS kesehatan, beasiswa pendidikan untuk anak-anak, dan dukungan lainnya.

Dengan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan stakeholder dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi PMI dan keluarganya, serta memastikan hak-hak mereka terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2020). *IMPLEMENTASI FUNGSI KEIMIGRASIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 3 (PMI Non Prosedural, Fungsi Keimigrasian, Perlindungan Pekerja Migran*.
- Arista, Y. (t.thn.). *“PERAN MIGRANT CARE DALAM MENGADVOKASI KEPENTINGAN BURUH MIGRAN INDONESIA TAHUN 2014-2016.”*.
- BADAN PUSAT STATISTIK. (2022, November 7). *Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,86 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,07 juta rupiah per bulan*. Dipetik October 21, 2024, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>
- BBC. (2020). *Cerita Keji Penyiksaan TKI di Arab Saudi oleh Majikan Perempuan Baca artikel detiknews,*.
- BBC NEWS INDONESIA. (2021, March 19). Ratusan TKI dilaporkan hilang di Arab Saudi, diduga disekap atau kabur di bawah sistem 'perbudakan' kafala. BBC. Dipetik October 21, 2024, dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834>
- BBC world-Detiknews. (2020, July 15). *Cerita Keji Penyiksaan TKI di Arab Saudi oleh Majikan Perempuan. detikNews*. Dipetik October 21, 2024, dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-5093920/cerita-keji-penyiksaan-tki-di-arab-saudi-oleh-majikan-perempuan>
- BP2MI. (2023). *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>.
- BP2MI. (2023). BP2MI Terus Edukasi Masyarakat untuk Putus Mata Rantai Calo dan Sindikat.

- BP2MI. (t.thn.). *BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*. Diambil kembali dari BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: <https://bp2mi.go.id/pptkis/indeks>
- Coffman, J., & Beer, T. (2015). *THE ADVOCACY THEORY FRAMEWORK*.
- D. A., Marsyaf, & Subekti, R. (t.thn.). *PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGA*. Diambil kembali dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38543>
- DISNAKERTRANS. (2022). *Layanan PMI sangat Progresif, NTB raih 5 Kategori Migrant Worker Award 2022*. Diambil kembali dari <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/layanan-pmi-sangat-progresif-ntb-raih-5-kategori-migrant-worker-award-2022/>
- Fedho, M. A. (2022, April 8). *Kasus-kasus TKI yang Dieksekusi Mati di Arab Saudi, Nomor 2 Tragis*. Diambil kembali dari SINDOnews.com: <https://international.sindonews.com/read/737493/43/kasus-kasus-tki-yang-dieksekusi-mati-di-arab-saudi-nomor-2-tragis-1649408679>
- Hasmi, N. A. (2022). *Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia*. Diambil kembali dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/21600>
- HRWG. (2023, March 10). *Negara Harus Meminta Maaf, Menegakkan Keadilan dan Ubah Kebijakan Merugikan Kartika dan Semua PRT Migran*. Diambil kembali dari HRWG: <https://www.hrwg.or.id/2023/03/10/negara-harus-meminta-maaf-menegakkan-keadilan-dan-ubah-kebijakan-merugikan-kartika-dan-semua-prt-migran/>
- ILO. (2022). *Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender (Implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017)*.

KABAR BUMI. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://kabarbumi.or.id/>

KABAR BUMI. (2022). *MODUL PANDUAN PENANGANAN&PENDAMPINGAN KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA*.

KABAR BUMI. (t.thn.). *International Migrant Day, Stop Perbudakan Modern*. Dipetik 2022, dari <https://www.instagram.com/kabarbumipusat?igsh=MTA5dXNia20yY3p5>.

KABAR BUMI. (t.thn.). *Pidato Karsiwen disampaikan pada pertemuan stakeholder IMRF di PBB pada 16 Mei 2022*. Diambil kembali dari https://fb.watch/tPP_Ep88Ou/. KBRI Riyadh. 2024. “Keselamatan/Safety PMI.”

KBRI RIYADH. (2022). *Keselamatan dan Safety PMI*. Diambil kembali dari https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/keselamatan_safety_pmi/647/information-sheet.

KBRI Riyadh. (2022). *Laporan Kinerja KBRI Riyadh*.

KEMENKO PMK. (2020). *Pemerintah Benahi Tata Kelola Layanan Pekerja Migran Indonesia*. Diambil kembali dari <https://kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-benahi-tata-kelola-layanan-pekerja-migran-indonesia>

KEMENKO PMK. (2021). *Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.*” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (t.thn.). *Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diambil kembali dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html>

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. (2022, August 22). *Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program Government to Government*. Diambil kembali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4457/tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-pemerintah-optimalikan-program-government-to-government>

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. (t.thn.). Diambil kembali dari Peduli WNI - Kemenlu: <https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html>

Kementrian Luar Negeri. (t.thn.). *Riyadh*. Diambil kembali dari Kemlu: <https://www.kemlu.go.id/riyadh>

KEMLU RI. (t.thn.). *Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri*. Diambil kembali dari <https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html>

Mediana. (2023). *83 Negara Jadi Tujuan Penempatan Pekerja Migran Penentuan negara penempatan perlu mempertimbangkan regulasi perlindungan pekerja migran. Di dalam negeri, tata kelola migrasi juga perlu diperbaiki*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/18/83-negara-tujuan-penempatan-telah-dibuka>

PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL. (2023, April 28). Diambil kembali dari *PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL | MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*: <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/1>

Plano, J. C., & Olton, R. (1988). *The international relations dictionary*. ABC-Clio. Dipetik October 21, 2024

PURWANTI, H. (2022). *Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban*. Diambil kembali dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html>.

Setyoningsih, E., MA, D. F., & Hermini S, M.Si, D. R. (t.thn.). *Peran LSM Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah di Arab Saudi Tahun 2009 dan 2010*. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/1676/1668>

